



PETANI INDONESIA SATU DEKADE: DI TENGAH IMPITAN IKLIM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH



BUKU PUTIH
SURVEI PERSEPSI PETANI 2024

Buku Putih Survei Persepsi Petani 2024

Petani Indonesia Satu Dekade: Di Tengah Impitan Iklim dan Kebijakan Pemerintah

©LaporIklim

Yayasan Warga Berdaya Untuk Kemanusiaan

Cetakan Pertama, Oktober 2024

Daftar Penulis

Ahmad Arif, Said Abdullah, Eny Widiya Astuti, Fathiyya Azzahra, Hana Syakira, Hanan Anisa Saniya, Hermanu Triwidodo, Karlisa Priandana, Rahel Azzahra, Roza Yusfiandayani, Susanti Rahayu Violita, Yoesep Budianto, Windyah Puji Lestari.

Editor

Ahmad Arif

Penyelaras Akhir

Yoesep Budianto

Penataletak

Andika Ramadhan

Hak Cipta Gambar

Yoesep Budianto, presidenri.go.id

Arif, Ahmad., et al.

Buku Putih Survei Persepsi Petani

Jakarta, 2024

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih

4

Pengantar

5

Ringkasan Eksekutif

7

Pengenalan

10

Temuan

14

Kesimpulan &
Rekomendasi

51

Daftar Pustaka

54

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini disusun oleh Laporklim dengan dukungan penuh dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Tani dan Nelayan Center IPB University (TNC), serta Gerakan Petani Nusantara (GPN), yang telah berperan penting dalam proses penyusunan dan pengumpulan data. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang turut membantu menyebarluaskan survei ini melalui jaringan petani mereka di berbagai wilayah Indonesia.

Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada 304 petani serta jaringan pendamping petani di seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan berharga melalui partisipasi dalam survei ini. Partisipasi mereka telah memungkinkan kami untuk mendapatkan data dan wawasan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi petani di berbagai daerah.

Harapan kami, laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi dan persoalan yang dihadapi petani Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, dan semua pihak yang peduli terhadap masa depan pertanian di Indonesia. Kami percaya, dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi nyata di lapangan, kita semua dapat mengambil langkah yang lebih tepat dan efektif untuk mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Pengantar

Dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kesejahteraan petani masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Petani ibarat “roti yang ditumpuk” dan ditekan dari berbagai sisi. Mereka terhimpit persoalan konflik agraria, guremisasi, pendapatan dan kesejahteraan, akses terhadap input seperti pupuk, hingga perubahan iklim.

Dari banyaknya persoalan yang dihadapi petani, salah satu penyebab mendasarnya adalah kegagalan pemerintah menerjemahkan dan mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan melalui berbagai kebijakan dan programnya. Dengan berpegang pada konsep dan paradigma kedaulatan pangan yang berkembang saat ini, kebijakan dan program pemerintah seperti tidak menjawab persoalan atau bahkan salah arah. Cita-cita berdaulat pangan dan menjadikan petani lebih berdaulat, mulai dan sejahtera seolah hanya angan-angan dan berhenti pada dokumen indah nan menawan.

Daulat pangan sejatinya bicara tentang subyek penghasil pangan, yaitu petani dan lebih khusus petani skala kecil. Kedaulatan pangan bergerak jauh melampaui konsep ketahanan pangan yang lebih banyak bicara soal komoditas pangan semata. Pada konsep kedaulatan pangan perhatian utama ada pada cara pandang dan penempatan petani sebagai subyek yang dimanusiakan, yang dilibatkan secara bermakna yang tujuan akhirnya berhenti pada perbaikan kualitas hidupnya. Kedaulatan pangan bicara pada tingkatan yang jauh lebih tinggi dari pada level produksi.

Pemaknaan cita-cita dan mandat undang-undang pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan tak beringsut dari ketahanan pangan. Ibarat barang dagangan, yang diperdagangkan sama, hanya berbeda di kemasannya. Selama sepuluh tahun terakhir, kebijakan dan program pertanian pangan pemerintah tak berubah dari sebelumnya. Swasembada yang dikejar melalui peningkatan produksi mengorbankan tidak hanya lingkungan, tetapi juga petani itu sendiri. Indikasi yang paling nyata dengan terus terjadinya konflik agraria yang memakan korban petani terjadi di mana-mana.

Reforma agraria sebagai salah satu pilar penting kedaulatan pangan gagal diwujudkan. Sekalipun reforma agraria menjadi bagian dari program utama kedaulatan pangan nawa cita. Nyatanya dalam pelaksanaannya berbeda dengan konsep yang seharusnya, bahkan banyak ditemukan praktik ilegal, seperti penguasaan lahan oleh segelintir kelompok saja. Alhasil, puluhan hektar tanah masuk ke kantong pengusaha sawit, tambang, atau kayu. Sementara petani terus ditekan untuk melepas lahannya dengan berbagai alasan, salah satunya Program Strategis Nasional. Saat ini tercatat ada sekitar 17,24 juta petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 ha.

Kehidupan petani dalam sepuluh tahun terakhir seperti jalan di tempat atau bahkan cenderung mundur. Kebijakan dan program yang dibuat tidak mendorong perbaikan kehidupan petani, ibarat senjata yang menekan dan menghunus petani itu sendiri. Petani ada pada pilihan sulit, antara mau terhunus kebijakan atau mundur ditusuk ancaman perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan anomali cuaca, sehingga berdampak pada produktivitas mereka di lahan. Peran pemerintah sangat minim, bahkan belum ada upaya-upaya yang mampu melindungi petani dari dampak perubahan iklim yang makin parah. Petani dibiarkan berjuang sendiri keluar dari impitan kebijakan dan ancaman iklim.

Tiga permasalahan utama petani yang diakibatkan oleh perubahan iklim adalah berkurangnya hasil panen atau gagal panen, akses ke sumber air makin sulit karena kemarau panjang atau bahkan terjadi banjir besar dalam waktu singkat, serta paparan sinar matahari yang makin terik menyebabkan tubuh lebih mudah sakit. Dalam beberapa kesempatan, kami menerima sejumlah laporan kematian petani yang diduga karena makin panasnya suhu di lahan.

Survei Persepsi Petani 2024 yang diselenggarakan oleh LaporanKlim bersama KRKP, GPN, dan TNC adalah upaya untuk memetakan persepsi petani terhadap program dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo selama satu dekade terakhir. Survei ini untuk menjawab apakah benar janji kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani telah tertunaikan, atau malah jadi senjata yang memukul petani. Selain itu, survei juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana petani selama ini bertahan dari dampak perubahan iklim secara swadaya. Survei ini diikuti oleh 304 responden yang berasal dari 24 provinsi, tersebar secara merata, khususnya di sentra-sentra pertanian.

Harapannya, dalam momen peringatan Hari Tani 2024, survei ini dapat menggambarkan secara jelas peliknya tantangan yang dihadapi oleh petani. Juga diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kesungguhan pemerintah memuliakan petani selama ini. Hasil survei ini juga diharapkan menjadi masukan dan evaluasi bagi para pihak, khususnya pemerintah, agar dapat merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani Indonesia dan mewujudkan kedaulatan pangan yang sebenar-benarnya.

Jakarta, 24 Oktober 2024

Prof. Hermanu Triwidodo
Kepala Tani dan Nelayan Center IPB University

Ringkasan Eksekutif

Buku putih ini disusun berdasarkan hasil **Survei Persepsi Petani 2024**, yang dilakukan oleh LaporanKlim bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Gerakan Petani Nusantara (GPN), Tani dan Nelayan Center (TNC), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Kebijakan Pemerintah

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai program untuk mendukung petani, seperti pembangunan bendungan dan irigasi, realitanya banyak petani yang merasa tidak merasakan manfaatnya. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Petani 2024, hanya 51,3 persen petani yang merasa akses irigasi membaik, sementara 44,1 persen masih merasa kesulitan mendapatkan air.

Masalah lain yang dihadapi petani adalah akses terhadap pupuk bersubsidi. Walaupun anggaran subsidi pupuk terus meningkat dalam 10 tahun terakhir, distribusinya tidak merata, dan 48 persen petani merasa mereka belum mendapatkan akses yang memadai terhadap pupuk bersubsidi.

Hasil survei tahun 2024 menunjukkan tidak adanya perubahan dari kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun. Survei Persepsi Petani tahun 2018 juga menunjukkan bahwa 37 persen petani tidak mendapatkan akses ke pupuk, sementara 54 persen petani saat itu tidak merasakan adanya perbaikan irigasi dan akses air.

Selain itu, akses terhadap modal juga menjadi kendala besar bagi petani kecil. Banyak dari mereka yang masih mengandalkan pinjaman dari tengkulak atau rentenir dengan bunga tinggi karena sulitnya mengakses kredit usaha rakyat (KUR). Hanya 42,1 persen petani yang merasa akses modal mereka membaik selama sepuluh tahun terakhir.

Model Pertanian Berkelanjutan

Model pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim

semakin menjadi kebutuhan mendesak. Banyak petani yang mulai beralih ke sistem irigasi berkelanjutan, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap anomali cuaca, dan menyesuaikan waktu tanam untuk mengurangi risiko gagal panen.

Namun, upaya ini belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah, terutama dalam hal penyediaan pupuk organik dan benih unggul. Survei menunjukkan bahwa mayoritas petani masih menggunakan benih sendiri, dan 51,6 persen merasa pemerintah tidak memberikan bantuan pupuk organik yang memadai.

Survei tahun 2018 juga menunjukkan hasil yang serupa, di mana saat itu 36 persen petani mengaku bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan pupuk, serta 46 persen mereka menggunakan benih secara mandiri. Artinya, tidak ada bantuan benih unggul dari pemerintah.

Perdagangan yang Berkeadilan

Sistem perdagangan gabah yang ada saat ini juga dianggap tidak adil oleh petani. Meskipun harga gabah di tingkat nasional mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir, banyak petani yang merasa harga pembelian pemerintah belum memberikan keuntungan yang layak bagi mereka.

Hampir setengah dari responden Survei Persepsi Petani 2024 merasa tidak puas dengan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah, yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi akibat inflasi dan harga pupuk yang semakin tinggi.

Sementara hasil survei tahun 2018, sebanyak 43 persen petani mengaku bahwa harga beli hasil

panen dari pemerintah cukup rendah dan tidak menguntungkan sama sekali. Tak hanya itu, 22 persen mengaku bahwa harga jual padi memang tidak menguntungkan bagi mereka dan keluarganya.

Artinya, selama sepuluh tahun terakhir harga beli hasil panen belum mengalami perubahan signifikan. Hal tersebut menyebabkan petani sulit lepas dari jerat hutang dan kemiskinan. Banyak rumah tangga miskin di Indonesia berasal dari keluarga yang mata pencaharian utamanya adalah petani.

Pangan Berkelanjutan

Pangan berkelanjutan perlu memikirkan darimana asal bahan pangan yang dikonsumsi. Sumber bahan pangan yang berasal dari jauh akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dari hasil survei persepsi petani menunjukkan bahwa mayoritas petani (50,7 persen) memperoleh pangan yang berasal dari pangan lokal atau menanam sendiri.

Penyimpanan bahan pangan merupakan kemampuan masyarakat atau rumah tangga dalam menyimpan atau membuat cadangan pangan untuk kebutuhan ketahanan pangan rumah tangga. Penyimpanan ini memberikan rasa dan kondisi *secure* terhadap kebutuhan pangannya selama periode produksi bahan pangan sampai pada masa panen kembali. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 48 persen rumah tangga petani memiliki cadangan pangan.

Ada perubahan cukup signifikan dari akses ke pangan lokal atau yang dihasilkan sendiri oleh petani. Survei tahun 2018 menyebutkan bahwa 60 persen petani mengonsumsi pangan yang dihasilkan sendiri atau tidak membeli produk-produk pabrik. Sementara survei tahun 2024, kemampuan memproduksi pangan sendiri turun sebanyak 10 persen.

Artinya, ada penurunan ketahanan pangan skala rumah tangga, di mana saat ini petani lebih banyak membeli. Hal tersebut berimbas pula pada kemampuan ekonomi mereka, padahal harga jual

hasil panen dirasakan tidak menguntungkan sama sekali.

Dampak Perubahan Iklim

Saat ini, tantangan petani makin besar di tengah pemanasan global. Suhu rata-rata permukaan Bumi terus meningkat, sehingga merusak keseimbangan cuaca dan iklim. Implikasi terbesarnya adalah risiko kekeringan atau malah kebanjiran di lahan-lahan dan pemukiman petani.

Perubahan iklim menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Cuaca ekstrem, musim yang tidak menentu, kekeringan, dan suhu yang semakin panas telah mengganggu produksi pertanian, menyebabkan penurunan hasil panen dan bahkan gagal panen di banyak wilayah. Survei menemukan bahwa 98,7 persen petani mengakui adanya perubahan iklim, dengan mayoritas mengalaminya dalam bentuk kekeringan (70,7 persen) dan musim yang tidak menentu (71,7 persen).

Dampak perubahan iklim ini memperparah kondisi ekonomi petani, dengan banyak kejadian penurunan produksi, bahkan gagal panen. Sebanyak 77,6 persen petani mengaku hasil panennya turun karena perubahan iklim, sedangkan 46,7 persen menyatakan bahwa mereka mengalami gagal panen.

Selain itu, cuaca ekstrem menyebabkan masalah kesehatan bagi para petani, dengan meningkatnya kasus dehidrasi, penyakit akibat paparan sinar matahari berlebih, dan bahkan kematian. Survei juga mencatat bahwa 91,4 persen petani merasa khawatir perubahan iklim akan berdampak buruk pada masa depan profesi mereka dan kesejahteraan keluarga.

Harapan Petani untuk Masa Depan

Petani berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap permasalahan yang mereka hadapi, terutama dalam hal kebijakan agraria, distribusi pupuk, akses terhadap modal, dan

adaptasi terhadap perubahan iklim. Mereka juga menginginkan pelibatan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan terkait sektor pertanian untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Dengan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terjaga,

kesejahteraan petani dapat meningkat, dan dampak perubahan iklim dapat diminimalkan. Pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas internasional untuk mendukung inovasi teknologi pertanian, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dan pendidikan bagi petani muda guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

Pengenalan

Latar Belakang

LaporIklim bersama Tani dan Nelayan Center Institut Pertanian Bogor (TNC IPB), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Gerakan Petani Nusantara (GPN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menyadari dampak nyata perubahan iklim terhadap petani Indonesia. Sayangnya, sejumlah program dan kebijakan pemerintah selama sepuluh tahun ini belum mampu melindungi petani. Oleh karena itu, kami melakukan survei untuk mengkaji persepsi petani Indonesia, memahami secara komprehensif persoalan petani, sekaligus menggali lebih dalam bagaimana petani bertahan di tengah persoalan cuaca dan musim yang semakin tidak menentu, harga pupuk mahal, risiko kekeringan, dan ancaman gagal panen.

Pengumpulan data dilakukan secara daring/*online* terhadap para petani di 24 Provinsi melalui jaringan masing-masing Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat. Pengumpulan data dimulai pada 10 September hingga 20 September 2024. Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh 304 responden. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan batas kesalahan 5,8 persen dari populasi.

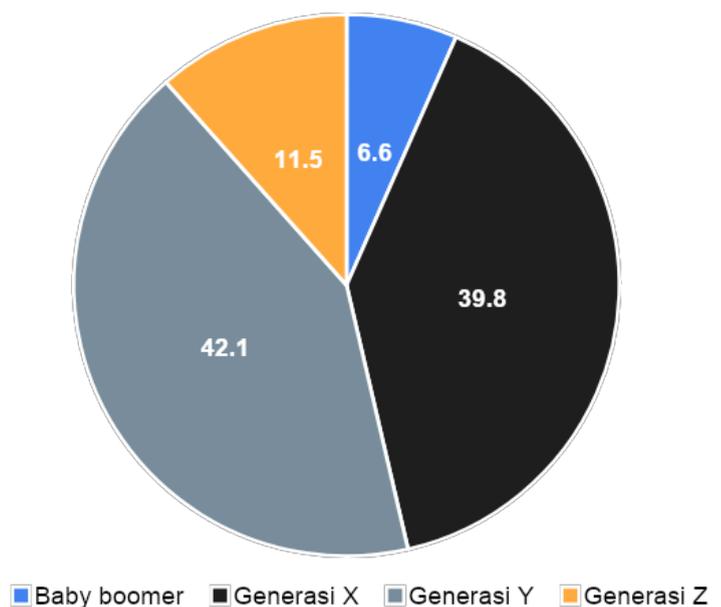
Survei Persepsi Petani 2024 juga menjadi simpul dan refleksi dari Survei Persepsi Petani Terhadap Program dan Kebijakan Kedaulatan Pangan Jokowi-Jusuf Kalla 2018 yang dilakukan oleh KRKP. Pengumpulan metode dilakukan secara langsung melalui wawancara tatap muka di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Jumlah responden yang dikumpulkan adalah 121 orang.

Dua survei ini adalah gambaran utuh dari suara-suara petani yang telah lama tidak didengar oleh pemerintah. Hasil survei diharapkan dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam sektor pertanian selama sepuluh tahun terakhir, serta tantangan yang dihadapi petani di tengah dampak krisis iklim yang semakin parah.

Demografi Responden

Kelompok Usia

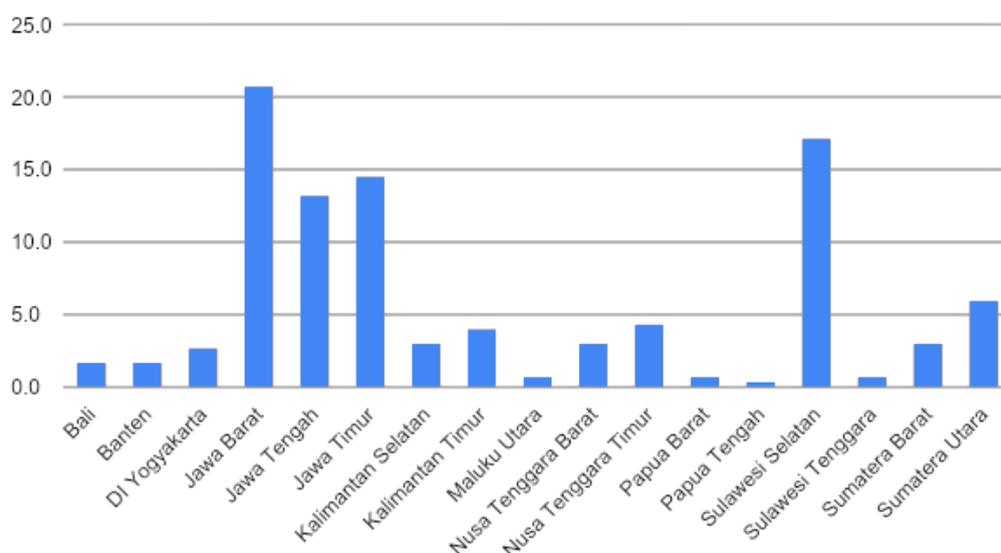
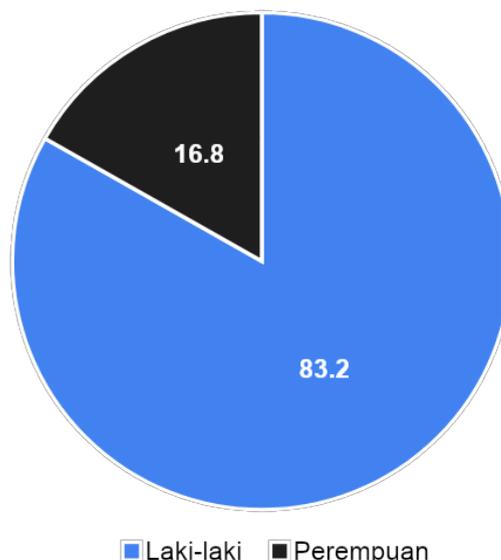
Responden merupakan petani di rentang usia 28-59 tahun, dengan kelompok responden paling dominan masuk pada kategori generasi Y/milenial (28-43 tahun) sejumlah 42,1 persen. Kelompok yang mendominasi di urutan kedua merupakan generasi X yang berkisar pada rentang usia 44-59 tahun sebanyak 39,8 persen. Sementara generasi yang lebih muda, yaitu generasi Z, hanya 11,5 persen. Selain itu, terdapat responden dari Generasi *baby boomer* yaitu sebesar 6,6 persen. Profil usia responden petani sesuai dengan Sensus Pertanian yang menunjukkan bahwa ada penuaan petani Indonesia dengan



tingkat regenerasi rendah (Badan Pusat Statistik, 2023). Rata-rata usia generasi milenial yang berprofesi sebagai petani cukup tua/mendekati generasi X, yaitu 42 tahun.

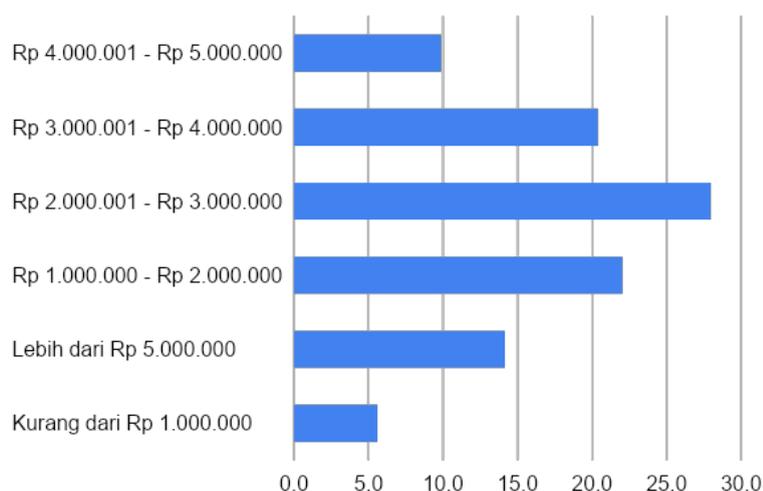
Gender dan Lokasi

Meskipun gender yang dominan sebagai pengisi survei didominasi oleh kelompok laki-laki sebesar 83,2 persen, tingkat partisipasi responden perempuan masih terbilang cukup besar yaitu sebanyak 16,8 persen. Artinya dari 10 orang responden, setidaknya ada 2 orang responden perempuan. Responden tersebar di 24 provinsi. Sebaran lokasi responden terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, yang mana daerah-daerah ini merupakan sentra penghasil beras nasional.



Pendidikan dan Ekonomi

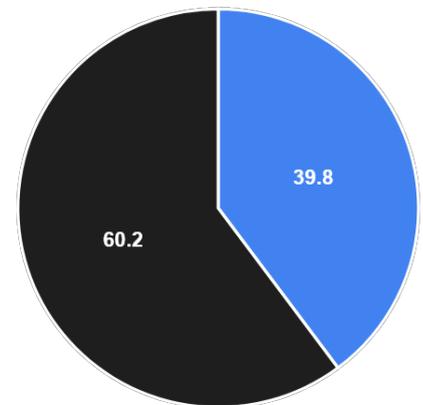
Pendidikan paling banyak berasal dari tamatan SMA/ sederajat (37,5 persen) dan Sarjana (32,9 persen), disusul oleh lulusan SD/ sederajat (8,6 persen), tamatan Diploma (5,6 persen), dan Pascasarjana (3,6 persen). Responden yang tidak sekolah juga turut mengisi sebanyak (1,3 persen). Hal ini menjadi indikator bahwa dunia pertanian banyak diakses oleh kelompok yang berpendidikan tinggi, meskipun masih terdapat lulusan SD/ sederajat (8,6 persen) dan responden yang tidak sekolah (1,3 persen).



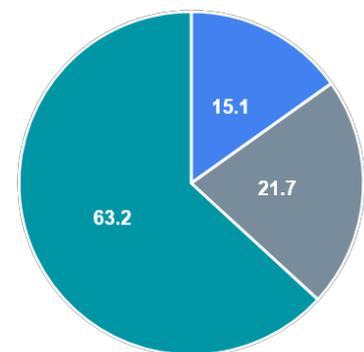
Dari sisi ekonomi, pengeluaran terbanyak petani berkisar antara Rp 2-3 juta dalam sebulan. Jika dibandingkan dengan data Pendapatan Bersih Pekerja Bebas Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama pada 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023), terdapat kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran petani, di mana rata-rata pendapatan dari seluruh provinsi jika digabungkan berada di bawah 1,5 juta. Hal ini dapat berdampak terhadap masalah kesejahteraan petani dan mempengaruhi keberlanjutan pertanian.

Kesejahteraan petani juga erat hubungannya dengan status lahan olahannya. Berdasarkan hasil survei 2024, kepemilikan lahan oleh petani didominasi milik sendiri, sementara sisanya adalah lahan sewa dan lahan saku/bagi hasil dengan pemilik lahan. Sayangnya, kepemilikan yang besar tersebut tidak sebanding dengan luasannya. Hampir 40 persen lahan petani berstatus gurem atau luas lahan kurang lebih 0,5 ha.

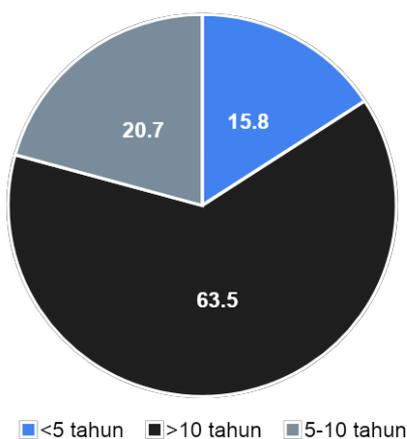
Berdasarkan hasil survei, lebih dari separuh responden (63,5 persen) adalah petani dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Responden berprofesi sebagai petani selama 5-10 tahun sebanyak 20,7 persen, sedangkan petani yang berprofesi di bawah 5 tahun menempati urutan terendah sebanyak 15,8 persen. Dari data tersebut, rata-rata responden berprofesi menjadi petani selama 14,8 tahun. Profesi sebagai petani menjadi tumpuan ekonomi mereka untuk menghidupi setidaknya 4 anggota keluarganya.



■ Gurem ■ Normal

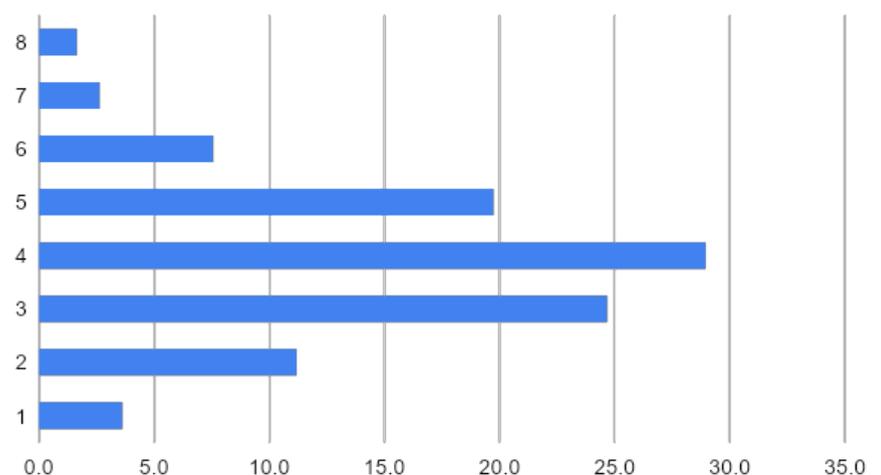


■ Lahan saku/bagi hasil dengan pemilik lahan
 ■ Lahan sewa
 ■ Milik sendiri



■ <5 tahun ■ >10 tahun ■ 5-10 tahun

Jumlah Anggota Keluarga



Pertanian masih menjadi profesi jangka panjang bagi sebagian besar responden, namun juga menunjukkan sedikit regenerasi pada petani muda. Hal ini menjadi tantangan bagi regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian, dan penting untuk memberi dukungan bagi petani pemula. Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi keluarga bagi sebagian responden namun kesejahteraan keluarga tentunya bergantung pada penghasilan

petani, yang sayangnya, meskipun sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan berpendidikan tinggi, masih mengalami kesenjangan pada pendapatan dan pengeluarannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang menyebabkan stagnasi pada sektor pertanian sehingga menghambat kesejahteraan petani? Apakah kebijakan yang sudah berjalan selama satu dekade ini belum pernah dievaluasi dan diukur dampaknya untuk memperbaiki pengelolaan pertanian?

Dua mama di Fak Fak, Papua Barat, berjualan hasil bumi mereka berupa sayur-sayuran.

TEMUAN



Kebijakan yang Mengimpit Petani

Oleh: Eny Widiya Astuti

'Pangan adalah hidup matinya suatu bangsa' - Ir. Soekarno (1952)

Indonesia telah lama menyadari pentingnya sektor pertanian untuk masa depan. Kebijakan demi kebijakan pertanian silih berganti diambil untuk mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sayangnya, kebijakan pemerintah selama ini belum mampu menuntaskan permasalahan laten pertanian Indonesia.

Jika menengok kebijakan pemerintah Indonesia selama 10 tahun terakhir, sektor pertanian menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Selain kebijakan harga dan akses pupuk, dua kebijakan besar yang dijalankan semasa pemerintahan Joko Widodo adalah reforma agraria dan perhutanan sosial. Dalam tinjauan kritis, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Salah satu kebijakan skala nasional yang konsisten dijalankan adalah pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian, seperti saluran irigasi, bendungan, dan akses jalan ke sentra pertanian. Hingga tahun 2023, lebih dari 60 bendungan telah dibangun dengan tujuan mendukung produktivitas pertanian di daerah.

Pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir belum mampu memenuhi kebutuhan air bagi petani. Berdasarkan hasil Survei Persepsi Petani 2024, sebanyak 22,4 persen petani mengaku tidak setuju dan 8,2 persen merasa sangat tidak setuju apabila dikatakan akses pengairan sawah saat ini lebih baik. Banyak saluran irigasi belum diperbaiki serta manajemen distribusi air yang belum efisien.

Jokowi juga mendorong modernisasi pertanian melalui program mekanisasi pertanian. Penggunaan teknologi dalam sektor pertanian dimaksudkan untuk mengganti metode konvensional yang

dianggap kurang efisien. Pemerintah memberikan bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani. Dengan adanya mekanisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, efisiensi waktu, serta pengurangan ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia (Kementerian Pertanian, 2023).

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (2023), persentase petani yang menggunakan teknologi digital dan alat mesin pertanian modern hanya 46,8 persen. Apabila dibandingkan dengan total jumlah petani nasional, maka ada 15 juta petani yang masih menanam dan panen menggunakan teknologi sederhana atau cara-cara konvensional.

Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi pangan. Pemenuhan pangan masyarakat tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga mendorong pengembangan komoditas lain seperti jagung, kedelai, sagu, ubi, dan sorgum. Namun, diversifikasi pangan belum berjalan maksimal, malah cenderung bergerak mundur dengan kencangnya pembukaan lahan untuk padi di berbagai wilayah di Indonesia.

Jokowi memulai program lumbung pangan atau *food estate* sekitar tahun 2020, kemudian statusnya berubah menjadi proyek prioritas strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2023. Lokasi *food estate* berada di tujuh wilayah, yaitu Banyuasin (Sumsel), Humbang Hasundutan (Sumut), Kapuas dan Pulang Pisau (Kalteng), Belu dan Sumba Tengah (NTT), serta Merauke (Papua Selatan).

Dalam Perpres tersebut, proyek lumbung pangan diproyeksikan mampu meningkatkan ketersediaan beras nasional sebesar 45,4 juta ton dan produksi jagung 34,12 juta ton. Proses pembukaan lahan dan

penanaman padi menjadi gambaran nyata tergusurnya pangan lokal dengan beras. Komoditas pangan lokal, seperti ubi, sagu, atau sorgum digantikan beras.

Terakhir, salah satu inisiatif utama pemerintahan Jokowi adalah program reforma agraria dan perhutanan sosial. Program tersebut bertujuan untuk redistribusi lahan kepada petani kecil, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya. Program ini dimaksudkan untuk memperbaiki akses terhadap tanah serta meningkatkan kesejahteraan petani kecil, terutama mereka yang tidak memiliki lahan (Yustika, 2021).

Kebijakan pertanian di era Presiden Jokowi tidak luput dari berbagai kekurangan. Salah satunya adalah ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Meski ada upaya untuk mencapai kedaulatan pangan, Indonesia masih sangat bergantung pada impor sejumlah komoditas pangan, terutama beras, gula, kedelai, dan bawang putih (World Bank, 2023). Beberapa tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, impor beras dan komoditas lainnya masih tinggi, meskipun klaim kemandirian pangan terus diusung. Ketergantungan pada impor ini menunjukkan bahwa upaya swasembada belum sepenuhnya tercapai dan menjadi tantangan besar untuk masa depan ketahanan pangan (Saragih, 2020).

Selain impor pangan, bantuan alat dan mesin pertanian yang digelontorkan masih menemui persoalan distribusi yang tidak merata. Banyak laporan menunjukkan bahwa kelompok petani besar lebih mudah mendapatkan akses ke bantuan dibandingkan petani kecil. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam penerapan teknologi dan mekanisasi di lapangan (Kementerian Pertanian, 2023).

Salah satu masalah yang masih terus menghantui sektor pertanian di era Jokowi adalah ketidakstabilan harga komoditas pertanian, terutama ketika panen raya terjadi. Petani seringkali

mengalami kerugian akibat anjloknya harga saat produksi meningkat, sementara pada saat yang sama, konsumen menghadapi harga tinggi pada komoditas tertentu di luar musim. Upaya pemerintah untuk menstabilkan harga pangan melalui BULOG (Badan Urusan Logistik) belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi fluktuasi harga (Nugraha, 2022). Ketidakstabilan harga komoditas pertanian ini dapat disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan iklim yang berpengaruh terhadap proses produksi.

Persoalan lain yang juga masih ada di era Jokowi ini adalah belum optimalnya reforma agraria. Program reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan lahan kepada petani kecil belum berjalan maksimal. Banyak tantangan yang dihadapi, termasuk persoalan birokrasi, sengketa lahan, dan konflik agraria yang terus terjadi antara masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar. Meskipun ada kemajuan dalam perhutanan sosial, realisasi reforma agraria dalam konteks redistribusi lahan masih di bawah target yang dijanjikan (Yustika, 2021).

Terakhir, adalah kurangnya dukungan pasca panen. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, telah berusaha meningkatkan produksi melalui berbagai program, namun dukungan pasca-panen seperti teknologi pengolahan hasil pertanian, penyimpanan, dan akses pasar masih minim. Banyak hasil pertanian yang tidak terserap pasar dengan baik atau mengalami penurunan kualitas karena kurangnya infrastruktur pendukung, seperti gudang penyimpanan berpendingin atau teknologi pengolahan yang memadai (FAO, 2022).

Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan pertanian yang telah berjalan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Langkah-langkah ke depan perlu lebih terfokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim, memperkuat rantai nilai pertanian, memperbaiki

distribusi kebijakan, serta memberikan perhatian lebih pada aspek kesejahteraan petani kecil agar keberlanjutan sektor pertanian dapat lebih terjamin.



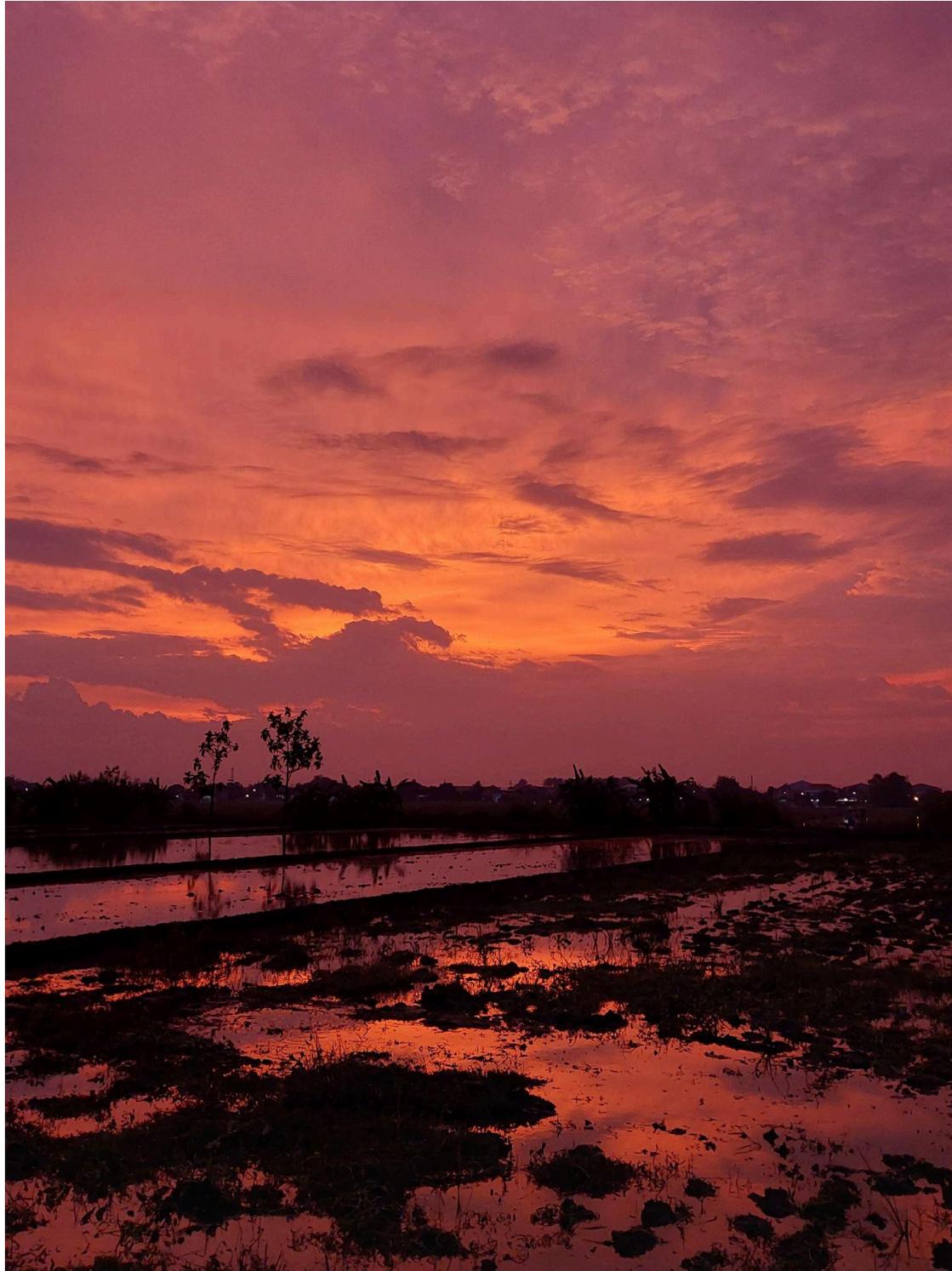
Perjuangan Petani di Bumi Mendidih

Oleh: Yoesep Budianto

Pertanian menjadi sektor yang mengalami dampak paling signifikan akibat perubahan iklim. Anomali pola hujan dan kenaikan suhu permukaan Bumi menyebabkan produksi pertanian makin lesu. Bahkan, kejadian cuaca ekstrem mampu menggagalkan panen petani, sehingga puso semakin luas.

Berdasarkan data pengamatan iklim oleh NOAA dan produksi padi FAO, fenomena kekeringan atau periode El Nino menyimpan cerita pahit bagi Indonesia. Antara tahun 2015-2016, produksi padi nasional turun hingga 11,5 persen karena kondisi kering. Sementara tahun 2019, panen padi turun sebesar 7,8 persen. Periode kering tahun 2023 turut menambah besarnya kerugian petani.

Tak hanya periode kering, fase basah atau La Nina berturut-turut selama tahun 2008 hingga 2011 menyebabkan penurunan produksi hingga 1,73 persen. Fase kering dan basah yang bergantian sebenarnya fenomena normal, namun durasi kekeringan dan kebanjiran terpantau makin lama dengan intensitas ekstrem.

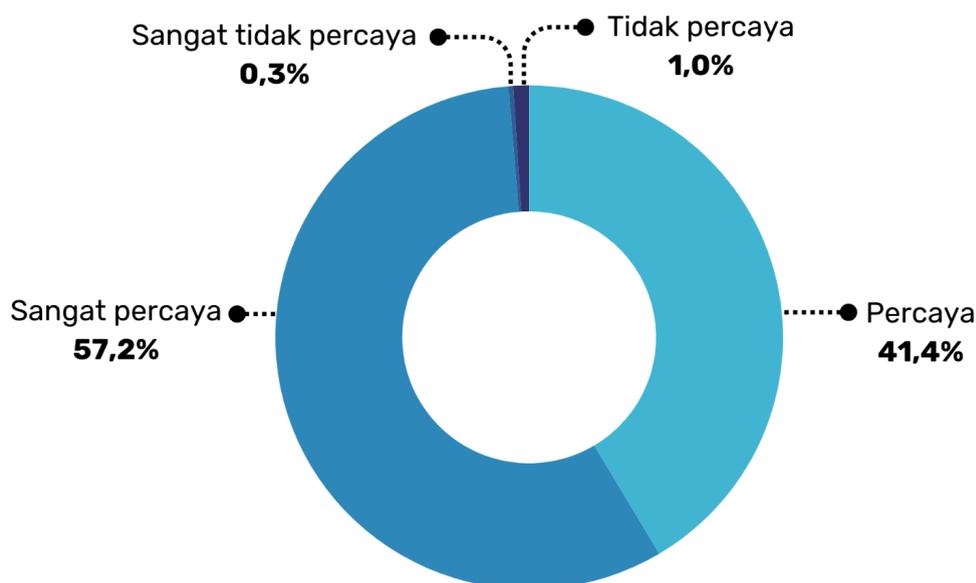


Laporan IPCC *Climate Change 2023: Synthesis Report* menyebutkan bahwa perubahan iklim telah mengurangi ketersediaan air secara global dan memperlambat produktivitas bahan pangan selama 50 tahun terakhir. IPCC juga menegaskan bahwa pemanasan global telah membuat jutaan orang berisiko kelaparan akut. (Lee et al., 2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (2023) juga menyebut bahwa pertanian merupakan sektor paling terdampak perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun signifikan. Cadangan air di berbagai daerah berkurang karena fase kekeringan panjang.

Petani diperhadapkan dengan situasi serius akibat perubahan iklim. Tak hanya produksi padi, ancaman terbesar juga datang dari teriknya sinar matahari yang berdampak pada tubuh manusia. Risiko tubuh dehidrasi, pingsan, hingga kematian terus meningkat seiring makin panasnya suhu permukaan Bumi.

Apakah Anda yakin/percaya bahwa saat ini telah terjadi perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, musim tidak menentu, hingga kejadian bencana lebih sering terjadi?

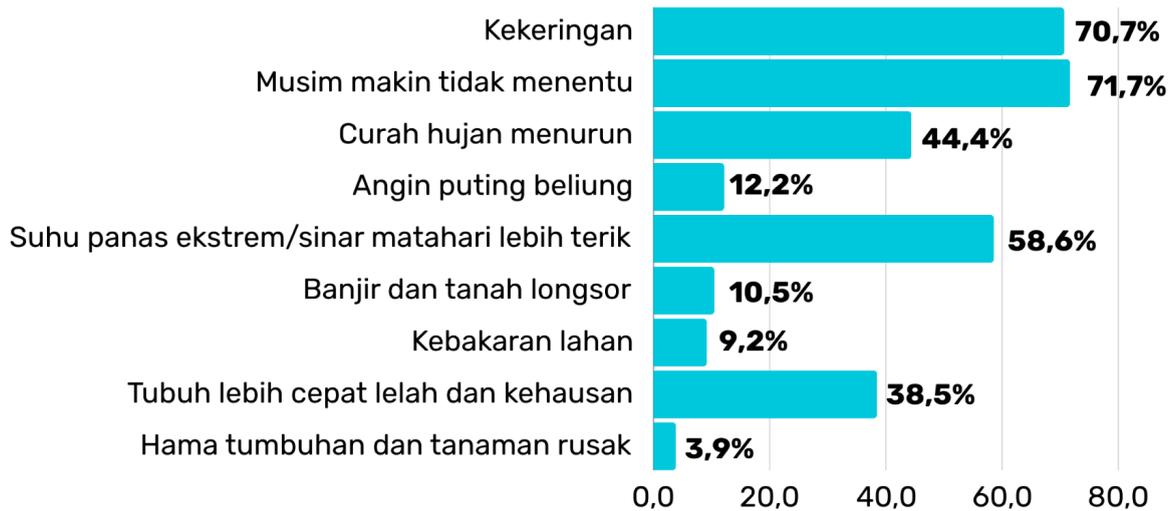


Dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan oleh petani Indonesia. Berdasarkan Survei Persepsi Petani 2024, mayoritas responden (98,7 persen) mempercayai bahwa saat ini telah terjadi perubahan iklim, mulai dari cuaca ekstrem, musim tidak menentu, hingga kejadian bencana lebih sering.

Kejadian perubahan iklim yang dialami oleh petani cukup beragam. Salah satu fenomena perubahan iklim paling banyak terjadi adalah musim makin tidak menentu. Sebanyak 71,7 persen petani pernah mengalaminya. Kejadian yang lain adalah kekeringan (70,7 persen) dan suhu panas ekstrem atau sinar matahari lebih terik (58,6 persen).

Fenomena musim makin tidak menentu adalah bukti kuat dari besarnya anomali iklim yang sedang terjadi di seluruh dunia. Pemanasan suhu global telah merusak sistem iklim Bumi, sehingga terjadi musim kemarau lebih panjang dan lebih panas atau sebaliknya. Artinya, nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem pertanian, seperti pranata mangsa, terancam dilupakan karena sudah tidak relevan.

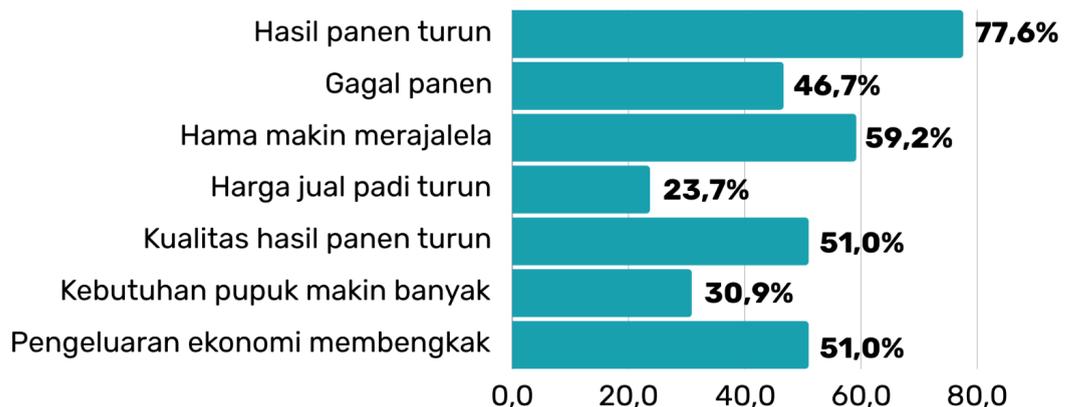
Apa kejadian perubahan iklim yang pernah Anda alami dan berdampak pada lahan pertanian Anda? Bisa menjawab lebih dari satu.



Musim tidak menentu, kekeringan, dan suhu panas ekstrem menjadi faktor pendorong terkuat hancurnya sektor pertanian Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut berimbas pada daya dukung lingkungan untuk pertanian. Dampak yang paling dirasakan oleh petani adalah hasil panen turun (77,6 persen), hama merajalela (59,2 persen), serta kualitas panen turun dan pengeluaran ekonomi membengkak (51 persen).

Tak hanya hasil panen turun, sebanyak 46,7 persen responden mengatakan bahwa mereka mengalami gagal panen akibat perubahan iklim. Kegagalan panen adalah pukulan keras bagi petani. Pasalnya, setiap kali mereka memasuki musim tanam, hampir semua modal ekonomi digunakan, bahkan tak sedikit yang akhirnya terilit hutang.

Apa dampak perubahan iklim yang Anda rasakan terhadap lahan pertanian dan produktivitasnya? Bisa menjawab lebih dari satu.



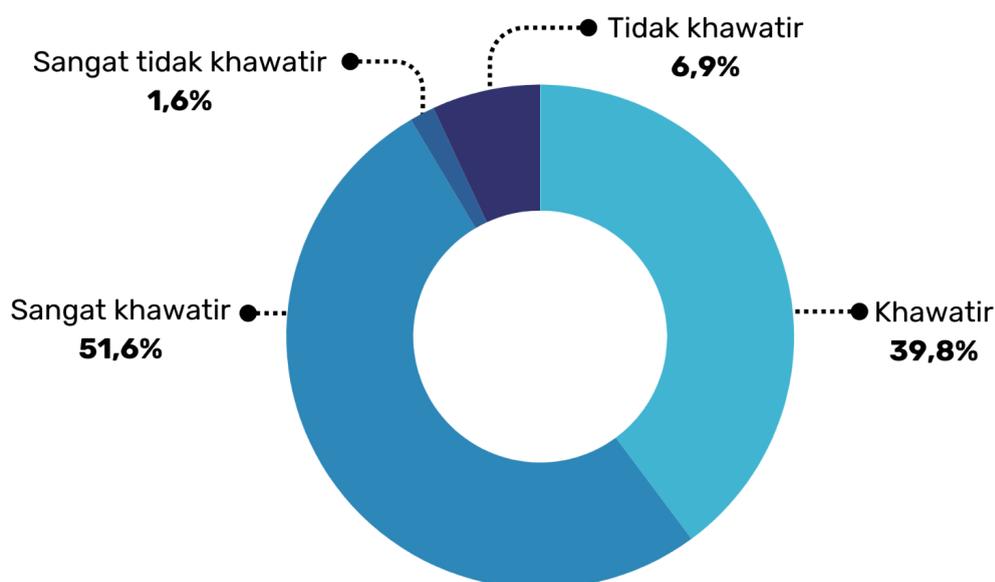
Penurunan produksi padi tidak hanya dikeluhkan responden survei, melainkan memang terjadi secara nasional. Berdasarkan data BPS periode 2018-2023, luas lahan panen nasional turun hingga 10,2 persen atau setara dengan 1,2 juta ha (Badan Pusat Statistik, 2024).

Penurunan luas lahan panen seiring dengan produksi padi nasional. Produksi padi nasional berkurang sedikitnya 5,2 juta ton sepanjang enam tahun terakhir. Dua provinsi yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah Jawa Tengah (1,4 juta ton) dan Sulawesi Selatan (1,1 juta ton) menurut Badan Pusat Statistik (2024).

Perubahan iklim diperkirakan terus memburuk ke depannya, seiring rendahnya komitmen negara untuk mengurangi emisi karbon. Berdasarkan data Global Carbon Atlas, negara Indonesia masuk dalam sepuluh negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Karenanya, tantangan petani untuk bertahan di tengah tekanan perubahan iklim makin berat ke depannya.

Survei Persepsi Petani 2024 juga menangkap kekhawatiran tinggi dari petani. Sebanyak 91,4 persen responden menyatakan bahwa mereka merasa khawatir perubahan iklim berdampak terhadap profesi sebagai petani dan masa depan keluarganya. Ancaman penurunan produksi padi hingga kerugian karena gagal panen adalah mimpi buruk bagi petani.

Seberapa khawatir Anda bahwa perubahan iklim berdampak terhadap profesi Anda sebagai petani dan masa depan keluarga Anda?



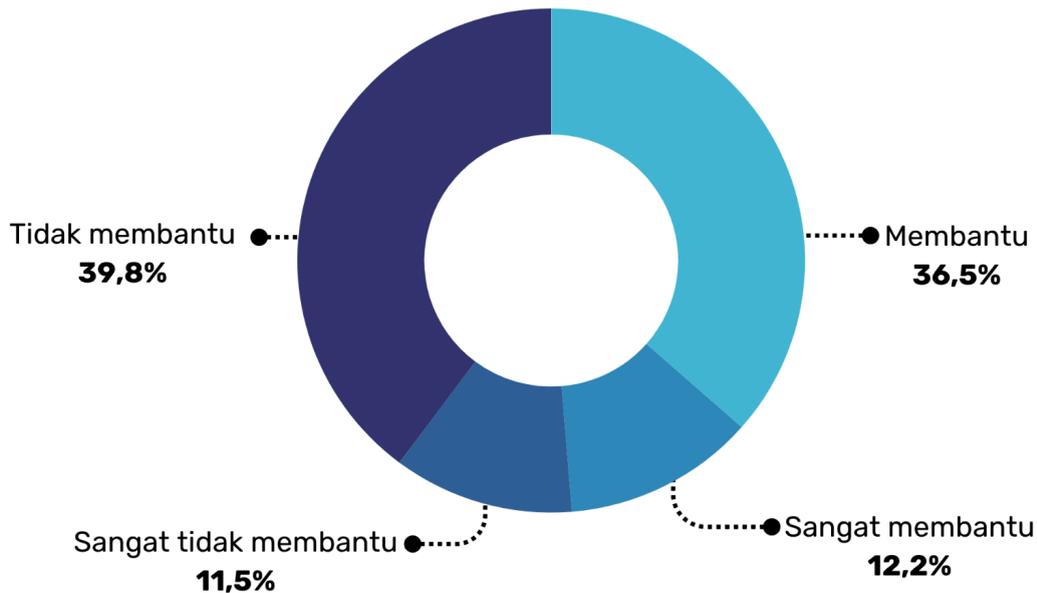
Besarnya tekanan perubahan iklim terhadap sektor pertanian membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Apalagi dalam struktur pendapatan negara (PDB), sektor pertanian menduduki posisi ketiga sebagai penyumbang terbesar perekonomian nasional. Sayangnya, peran pemerintah sangat minim dirasakan petani.

Lebih dari separuh responden (51,3 persen) mengatakan bahwa pemerintah tidak membantu sama sekali dalam memberikan solusi atas permasalahan dampak perubahan iklim yang petani alami. Berbagai program dan kebijakan pemerintah dinilai tak mampu menyelesaikan persoalan petani yang makin memburuk karena anomali cuaca.

Sebagai contoh, pemerintah membangun bendungan secara besar-besaran di berbagai daerah untuk mengatasi kekurangan air saat periode kering. Bahkan selama sepuluh tahun terakhir, sedikitnya ada 36 Proyek Strategis Nasional sektor bendungan yang telah selesai dibangun. Contohnya, bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan, bendungan Randugunting di Jawa Tengah, dan bendungan Sila di NTB.

Sayangnya, pembangunan puluhan bendungan tidak mampu menyelamatkan petani Indonesia dari penurunan produksi tanaman pangan atau kegagalan panen. Hal itu terbukti dari jeritan petani di berbagai wilayah Indonesia yang mengalami gagal panen pada periode El Nino 2023 hingga awal 2024. Petani hanya bisa pasrah menyaksikan tanaman padinya puso akibat kekurangan air.

Menurut Anda, seberapa membantu pemerintah dalam memberikan solusi atas permasalahan dampak perubahan iklim yang Anda rasakan sebagai petani?

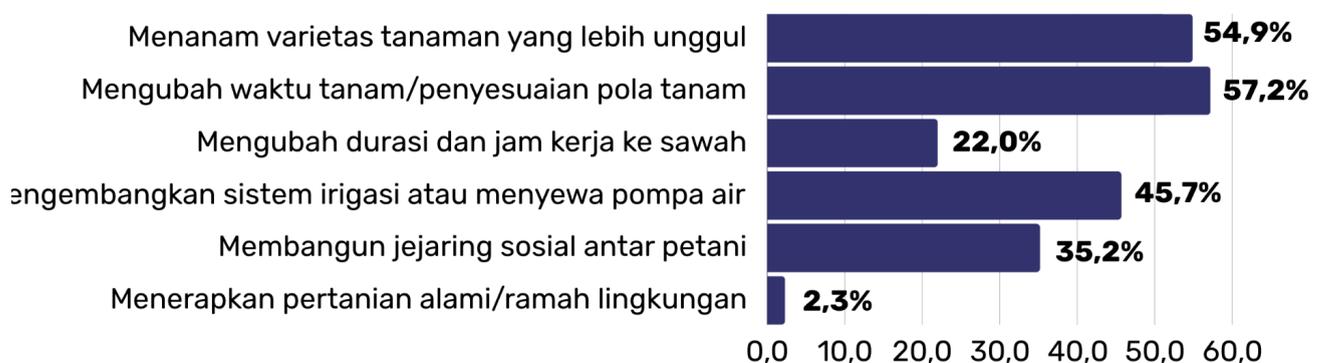


Di tengah gempuran perubahan iklim yang makin kuat, ternyata daya juang petani Indonesia untuk bertahan tetap kuat. Mereka terus beradaptasi dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Hasil survei menyebutkan bahwa 57,2 persen responden mengubah waktu tanam untuk mengurangi risiko gagal tanam atau panen. Petani secara swadaya melakukan pengamatan kondisi iklim.

Sementara 54,9 persen responden menggunakan varietas tanaman yang lebih unggul dan tahan terhadap anomali iklim. Varietas unggulan tersebut dinilai memiliki resistensi tinggi terhadap faktor penghambat pertumbuhan, seperti hama, kekeringan, dan banjir. Sebagai contoh, ada varietas padi Inpari yang cocok untuk sawah irigasi, varietas Inpago untuk lahan tadah hujan, serta varietas Luhur untuk padi-padi di dataran tinggi.

Upaya lain yang dilakukan petani adalah mengembangkan sistem irigasi berkelanjutan, membangun jejaring sosial antar petani untuk saling bantu dan bertukar pengetahuan, serta mengubah durasi dan jam kerja ke sawah. Ada pula petani yang mulai menerapkan pertanian alami atau berbasiskan keberlanjutan lingkungan.

Apa strategi yang Anda lakukan untuk menghadapi dampak perubahan iklim? Bisa menjawab lebih dari satu.



Petani di lahan sawah food estate yang terbengkalai di Sulawesi Tenggara.



Akses ke Sumber Produksi

Oleh: Said Abdullah

Akses terhadap sumber-sumber produksi salah satu syarat bagi perwujudan kedaulatan pangan. Akses terhadap sumber produksi merupakan keniscayaan (Propantoko et al., 2019). Dalam narasi lain, akses terhadap sumber daya produktif ini juga disebut dengan reforma agraria. Reforma agraria adalah penataan kembali (atau penataan ulang) susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah) untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tuna kisma, dan lain-lainnya) secara menyeluruh dan komprehensif (Wiradi, 2005).

Dalam pilar kedaulatan pangan, akses terhadap sumber-sumber produksi dapat diukur dari sisi akses terhadap lahan, air, benih dan permodalan. Peningkatan akses terhadap sumber produksi dapat dimaknai sebagai arah lurus perwujudan kedaulatan pangan.

Akses terhadap lahan

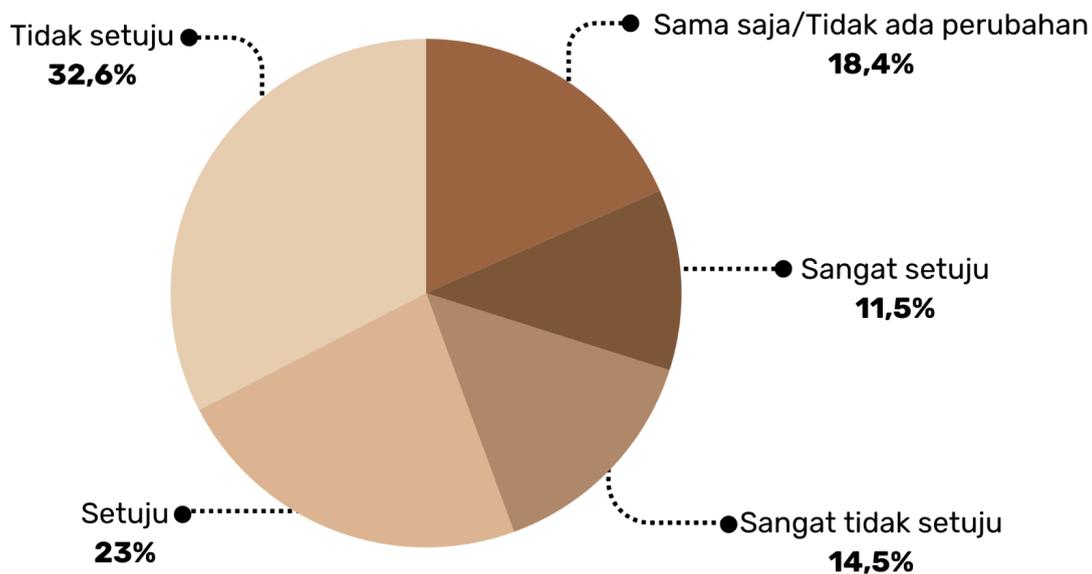
Pada tahun 2014, pemerintahan Jokowi-JK menetapkan kedaulatan pangan sebagai salah satu tujuan pembangunan. Hal ini termaktub dalam dokumen visi misinya, yaitu Nawacita. Kedaulatan pangan tercantum secara jelas pada agenda nomor 7 (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik) dalam visi misinya.

Reforma agraria merupakan salah satu agenda menuju kedaulatan pangan yang ada dalam dokumen tersebut. Sekurangnya ada tiga program reforma agraria yang akan dijalankan, yaitu (a) peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta ha untuk 1 juta keluarga petani kecil dan buruh tani tiap tahun, (b) distribusi 9 juta ha tanah untuk petani dan buruh tani, dan (c) meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian.



Setelah sepuluh tahun masa pemerintahan Joko Widodo dan cita-cita daulat pangan yang dicanangkan melalui reforma agraria masih jauh dari tujuan awalnya. Hal ini terekam melalui Survei Persepsi Petani 2024, di mana 32,6 persen tidak setuju dan 14,5 persen sangat tidak setuju bahwa mereka memperoleh akses terhadap lahan yang lebih baik selama sepuluh tahun terakhir. Apabila digabungkan dengan kondisi sama saja/tidak ada perubahan sama sekali, maka persentasenya naik menjadi 65,4 persen.

Saat ini Anda mendapat akses lahan yang lebih baik (meningkat lahan garapan dan/atau bertambah lahan yang dimiliki karena program pemerintah).



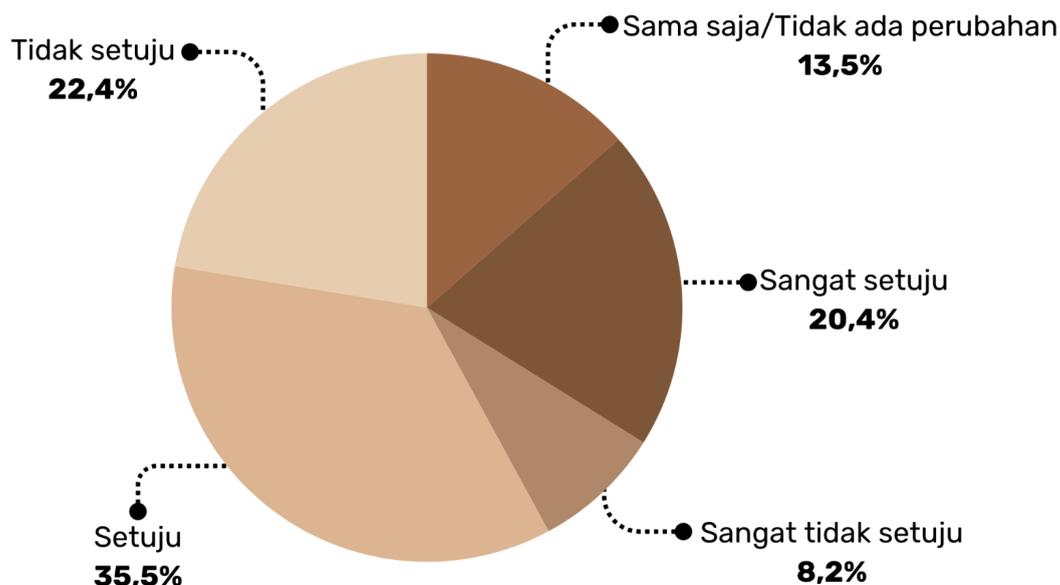
Persepsi petani ini tidak banyak berubah dalam kurun enam tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan Survei Persepsi Petani tahun 2018. Survei Persepsi Petani yang dilakukan KRKP pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 34 persen petani tidak ada perubahan akses terhadap lahan. Jika digabungkan dengan jawaban tidak ada perubahan maka sebanyak 69 persen petani menyatakan tidak ada perbaikan atas akses lahan.

Dua hasil survei sejalan dengan hasil Sensus Pertanian 2023 yang menunjukkan terjadinya peningkatan petani gurem. Dalam kurun sepuluh tahun alih-alih bertambah akses dan aset, kepemilikan lahan oleh petani justru mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya petani gurem dari 14,2 juta rumah tangga usaha pertanian pada 2013 menjadi 17,2 juta pada 2023. Dengan memperhatikan hasil survei dan data statistik yang ada, maka program kedaulatan melalui program reforma agraria masih jauh dari kata ideal. Selain itu kondisi ini juga menunjukkan bahwa cita-cita reforma agraria yang ada dalam nawacita jauh panggang dari api.

Akses terhadap air

Air dan pengairan merupakan faktor penting bagi produksi pangan nasional. Akses petani atas air yang memadai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan produksi pertanian. Pemerintahan Jokowi, terutama pada periode pertama memfokuskan pembangunan infrastruktur termasuk sektor pertanian dengan banyak membangun dan memperbaiki bendungan serta irigasi. Data Kementerian PUPR menunjukkan pada periode 2014-2024 pemerintah telah membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi (Arini, S. C. 2024).

Saat ini Anda mendapat akses pengairan sawah yang lebih baik karena saluran irigasi diperbaiki dan diatur pembagiannya.



Masifnya pembangunan infrastruktur pengairan memberikan dampak meningkatnya akses petani pada sumber pengairan. Hal ini terlihat dari respon petani, di mana 35,5 persen setuju dan 20,4 sangat setuju jika akses pengairan ke sawah lebih baik. Pembangunan dan perbaikan irigasi, pembangunan embung dan bendungan memberikan dampak positif bagi petani.

Meningkatnya akses petani pada air irigasi menyebabkan budidaya padi dapat dilakukan hingga dua kali. Di beberapa wilayah bahkan bisa dilakukan hingga tiga musim tanam. Walaupun jumlah petani yang setuju bahwa pengairan membaik, nyatanya masih ada total 30,6 persen yang merasa tidak ada perbaikan dan 13,5 persen merasa tidak ada perubahan atau sama saja. Hal ini menandakan bahwa perubahan akses pengairan ini belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh semua petani.

Jumlah respons petani yang merasa akses air irigasi makin baik pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah petani yang menilai akses terhadap pengairan sebesar 46 persen. Jumlah ini meningkat sebanyak 9,9 persen pada 2024. Walaupun jumlah petani yang merasa akses terhadap pengairan bertambah, jumlah petani yang merasa tidak mengalami perbaikan juga meningkat. Pada tahun 2018 jumlah petani yang menyatakan hal tersebut sebanyak 17 persen, sementara pada tahun 2024 meningkat tajam hingga mencapai 30,6 persen.

Akses terhadap pupuk

Persoalan pupuk terus menggelanding dari waktu ke waktu seolah tanpa solusi. Tiap presiden selalu mengungkapkan persoalan ini dan membuat sejumlah kebijakan. Salah satu kebijakan yang paling mudah dilihat adalah alokasi subsidi pupuk dan perubahan pola subsidi. Namun dari waktu ke waktu polemik pupuk ini tidak juga selesai, bahkan sampai hari ini. Persoalan ketidaktepatan waktu, jumlah, sasaran, jenis pupuk, penerima, sampai kebocoran distribusi seperti lingkaran tak berujung.

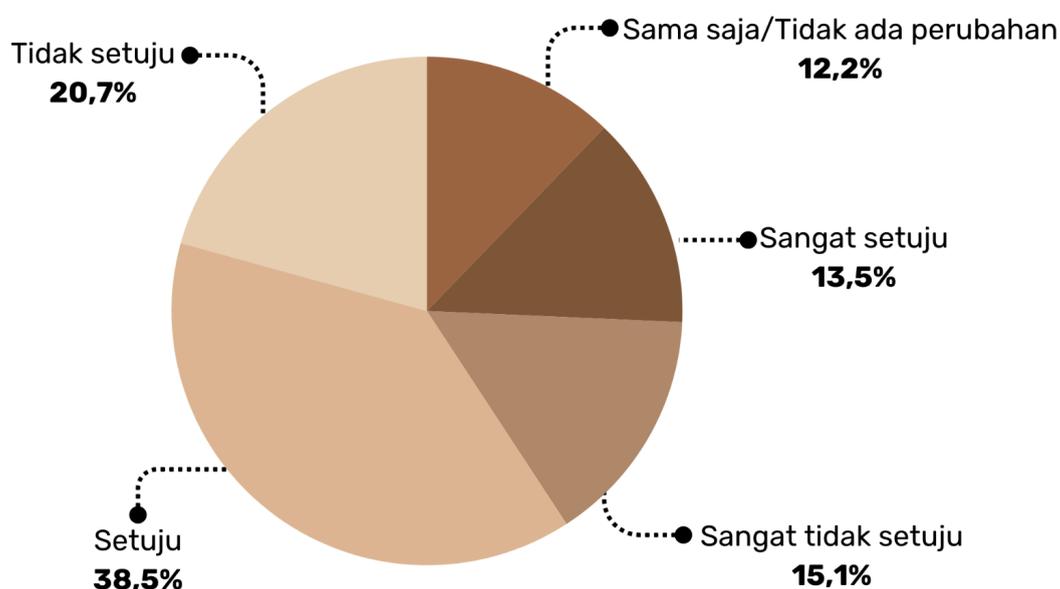
Pupuk merupakan faktor produksi yang penting bagi petani dalam rangka menjaga dan meningkatkan produksi. Menyadari hal ini, pemerintah berupaya keras membereskan persoalan pupuk. Salah satu langkahnya dengan menambah nilai subsidi pupuk. Dalam kurun 2014 sampai dengan 2023 pemerintahan Jokowi mengalokasikan

anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 284,5 triliun. Jumlah subsidi ini dua kali lebih besar dari alokasi subsidi periode pemerintah sebelumnya yang hanya sebesar Rp 110,6 triliun (CNBC, 2023).

Sayangnya, besarnya alokasi subsidi belum diimbangi dengan perbaikan model perencanaan, penyaluran, dan pengawasannya. Hal ini menyebabkan akses petani terhadap pupuk masih belum merata. Walaupun sebagian besar petani menyatakan akses terhadap pupuk lebih baik dalam kurun sepuluh tahun terakhir, nyatanya masih ada petani yang merasa tidak demikian. Sebanyak 20,7 persen tidak setuju dan 15,1 persen sangat tidak setuju apabila dikatakan bahwa saat ini akses pupuk telah memadai.

Jika dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Petani yang dilakukan KRKP tahun 2018, persentase petani yang merasa memiliki akses lebih baik meningkat. Peningkatan jumlah petani yang merasa akses terhadap pupuk membaik naik sebanyak 20,8 persen. Hasil Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan lebih dari separuh petani telah mendapat akses ke pupuk yang lebih baik.

Saat ini Anda mendapat akses pupuk yang lebih baik dan merata karena ada perbaikan dalam pembagiannya.



Walaupun persentase petani yang mengalami perbaikan ke akses pupuk semakin tinggi, namun jika dilihat dari persentase petani yang belum mendapatkan akses, ternyata masih cukup besar. Di sisi lain, anggaran subsidi yang naik tajam nyatanya belum mampu mengatasi kelangkaan pupuk bagi semua petani dalam survei ini.

Penelitian Zulaiha et.al (2018) memperkuat hal tersebut. Dalam penelitiannya, Zulaiha menunjukkan bahwa kinerja subsidi pupuk yang dicerminkan oleh 'lima tepat', yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, sasaran dan tempat pada tiap provinsi ada pada kisaran 30–96 persen. Persoalan lemahnya efektivitas subsidi pupuk ini juga ditemukan dalam audit sosial kebijakan pupuk bersubsidi yang dilakukan KRKP di empat provinsi pada tahun 2018. Temuan utamanya menunjukkan kebijakan pupuk bersubsidi tidak bisa memenuhi asas 6 tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga, tepat tempat dan tepat waktu. Selain itu implementasi kebijakan pupuk bersubsidi juga lemah dalam hal pengawasan dan partisipasi publik mulai dari aspek perencanaan hingga penggunaannya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa besaran subsidi yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi hak petani. Walaupun dilakukan tahun 2010, kajian Rahman dan Sudaryanto bisa memberikan gambaran dan penguat bahwa

persoalan petani yang belum memiliki akses memadai telah terjadi sejak lama, bahkan lebih dari dua dekade. Dalam kajiannya, mereka menemukan bahwa petani yang mengelola lahan kurang dari 0,5 ha hanya menerima 40 persen dari total subsidi pupuk (Rachman & Sudaryanto, 2010).

Di sentra produksi padi, penggunaan pupuk kimia oleh petani terus meningkat bahkan melebihi dosis anjuran. Hasil kajian Hadi et al. (2009), di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menunjukkan mayoritas petani (84 persen) menggunakan pupuk TSP dan NPK dengan dosis cukup tinggi.

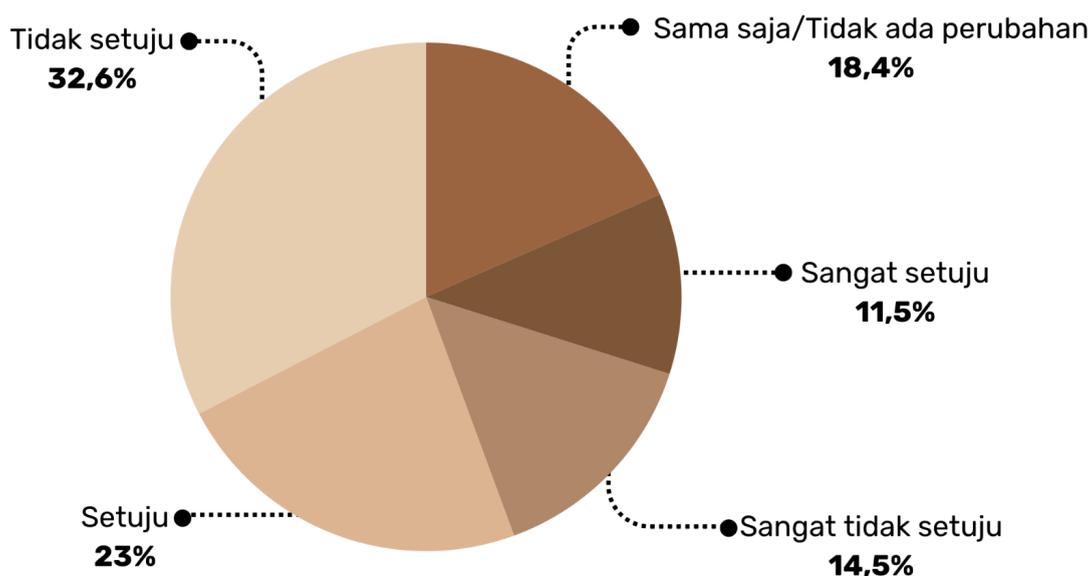
Peningkatan jumlah pupuk bersubsidi juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah petani yang menggunakan pupuk kimia sintetis. Simarmata dan Joy (2010) mengungkapkan sebanyak 91 persen petani di Indonesia merupakan pengguna pupuk kimia sintetis. Akibatnya, kualitas lahan pertanian terus menurun dari waktu ke waktu. Salah satu indikasinya adalah rendahnya kandungan C-organik tanah.

Akses pada permodalan

Proses produksi perlu didukung oleh permodalan yang mudah dan murah bagi petani. Pemerintah telah mendorong pemberian kredit bagi pelaku usaha kecil, termasuk petani melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Dalam kurun 10 tahun terakhir pemerintah telah menyalurkan KUR yang cukup besar. Namun, berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2023), diketahui selama periode tahun 2021-2023 penerima KUR untuk rumah tangga berusaha di pertanian berkisar hanya antara 8,33 - 10,15 persen, rumah tangga buruh tani berkisar antara 6,34 - 7,85 persen, dan untuk rumah tangga non pertanian berkisar 7,12 - 8,92 persen.

Hal di atas menunjukkan masih rendahnya akses petani terhadap pembiayaan, terutama KUR. Populasi keluarga petani tanaman pangan pada tahun 2023 sebesar 15,5 juta. Jika dibandingkan dengan penerima KUR pada tahun 2023 yang sebesar 10,15 persen, maka ada 13,9 juta keluarga yang belum mendapat akses KUR.

Saat ini Anda mendapat akses lahan yang lebih baik (meningkat lahan garapan dan/atau bertambah lahan yang dimiliki karena program pemerintah).



Hasil Survei Persepsi Petani 2024 juga menunjukkan bahwa 30,6 persen tidak setuju dan 13,2 persen sangat tidak setuju apabila saat ini diklaim akses permodalan telah membaik. Mereka mengatakan bahwa akses modal dari pemerintah, bank, atau lembaga keuangan masih sulit. Sementara petani yang merasa biasa saja atau tidak

ada perubahan sama sekali selama sepuluh tahun terakhir mencapai 14,1 persen. Untuk petani yang mendapat akses modal memadai sebesar 42,1 persen.

Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang dilakukan KRKP jumlah petani yang merasa akses terhadap permodalan membaik persentasenya meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak 31 persen petani menyatakan akses modalnya baik. Walaupun terjadi kenaikan pada petani yang merasa aksesnya membaik, petani yang merasa sebaliknya juga mengalami kenaikan. Petani yang merasa tidak membaik aksesnya bertambah 9,8 persen dibandingkan tahun 2018.

Walaupun persentase petani yang menganggap akses terhadap permodalan meningkat, nyatanya persentase petani yang kesulitan permodalan juga tidak sedikit. Bisa jadi realitas di lapangan, banyak petani yang tidak memiliki akses yang memadai. Akibatnya petani masih melakukan pinjaman ke rentenir atau pengijon masih terjadi hingga hari ini. Bahkan dalam kurun lima tahun terakhir semakin banyak petani yang terjerat hutang, terutama dari pinjaman *online*.

Para petani meminjam untuk modal tanam musim berikutnya karena hasil panen tidak memadai. Besarnya pinjaman petani tidak hanya menempatkan mereka pada jerat utang, namun juga menyebabkan persoalan sosial seperti perpecahan keluarga, perceraian, hingga bunuh diri.



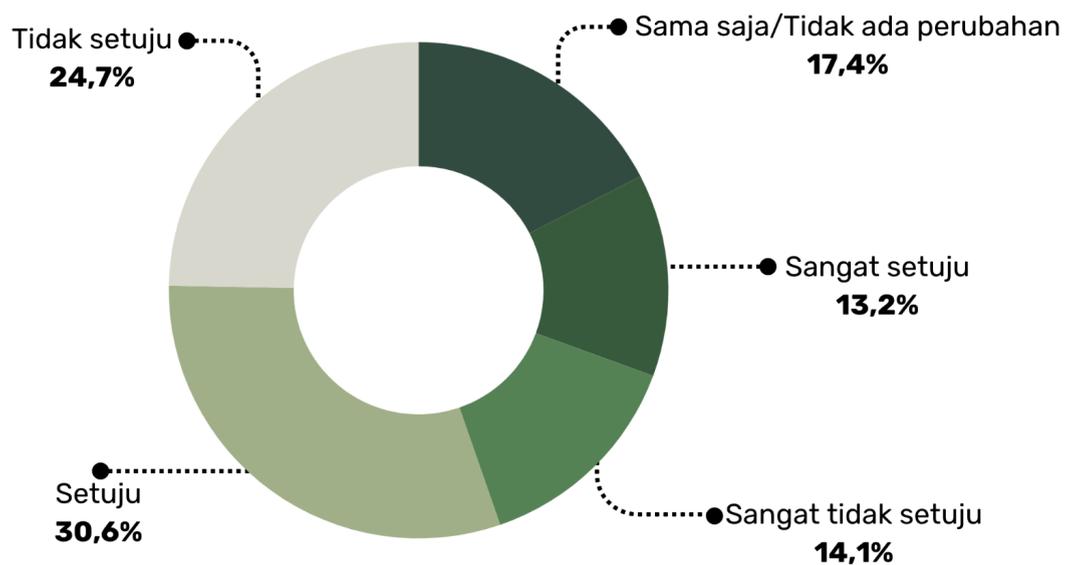
Model Pertanian Berkelanjutan

Oleh: Fathiyya Azzahra, Rahel Azzahra, Susanti Rahayu Violita

Model pertanian berkelanjutan merupakan sistem pertanian yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas pertanian, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial serta ekonomi. Peran petani dalam pertanian berkelanjutan sangat penting karena mereka yang berada di garis terdepan untuk mengimplementasikan model tersebut.

Survei Persepsi Petani 2024 menangkap perjuangan berat petani di Indonesia dalam upaya realisasi model pertanian berkelanjutan. Banyak petani merasa peran pemerintah sangat kurang untuk memberikan akses benih unggul dan pupuk organik ke petani, memastikan penyuluhan ke petani dilakukan secara maksimal, serta pelibatan petani dalam agenda-agenda sentral sektor pertanian.

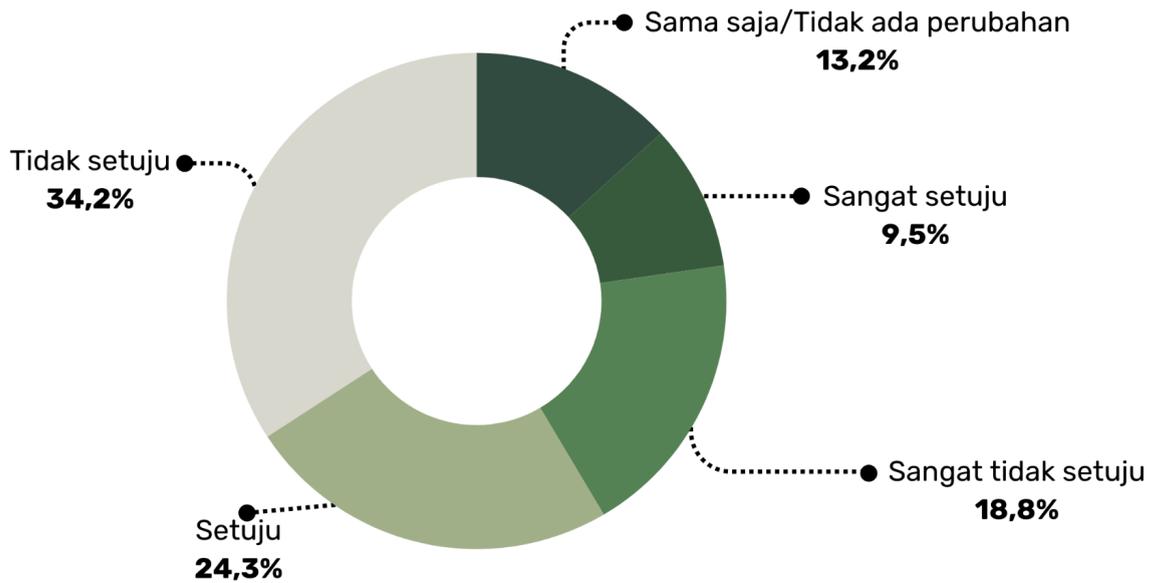
Dengan program dari pemerintah (bantuan: benih, pupuk, alat mesin), lahan Anda saat ini menjadi lebih subur.



Sebagian besar responden mengaku bahwa program dari pemerintah berupa bantuan benih, pupuk, dan alat mesin tidak membuat lahan pertanian lebih subur. Mereka menilai program pemerintah belum mampu meningkatkan kesuburan lahan. Padahal dalam model pertanian berkelanjutan, kesuburan tanah dan pengelolaan sumberdaya lahan memegang peran sentral untuk menentukan keberhasilan model tersebut.

Hasil Survei Persepsi Petani 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun 2018, di mana lebih dari 65 persen responden menyatakan bahwa program pemerintah tidak mampu meningkatkan kesuburan tanah mereka. Tingginya ketidakpuasan peran pemerintah membuktikan bahwa minim sekali perbaikan yang telah dilakukan, khususnya dalam upaya peningkatan kesuburan lahan.

Saat ini produksi padi Anda meningkat karena program dari pemerintah (bantuan benih, pupuk, alat mesin).

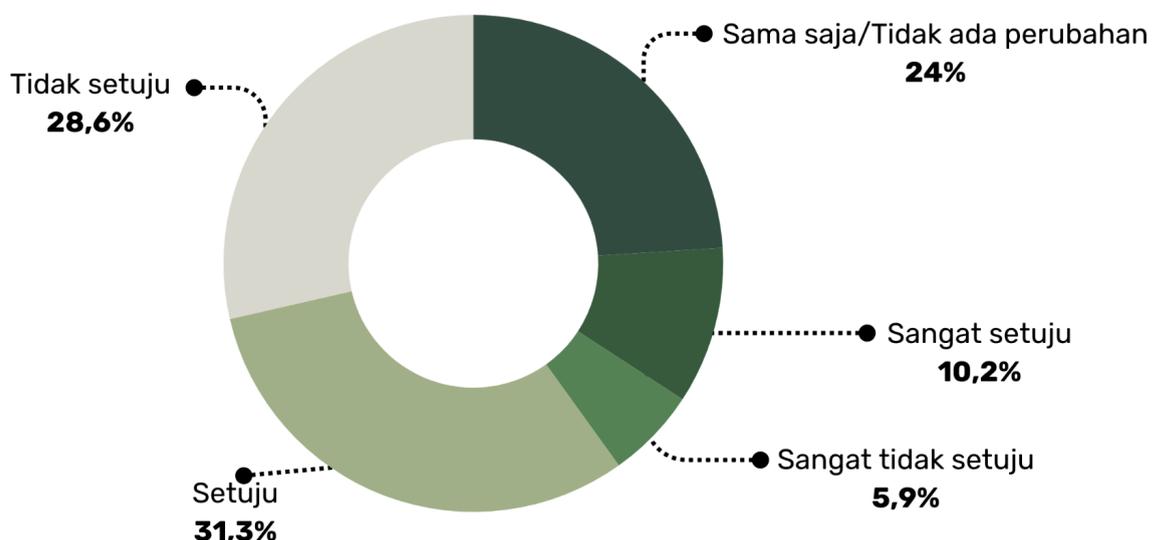


Kesuburan tanah yang tidak optimal berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian di lahan tersebut, meskipun telah banyak diintervensi oleh program pemerintah. Sebanyak 34,2 persen tidak setuju dan 18,8 persen sangat tidak setuju bahwa semua program pemerintah mampu meningkatkan produksi mereka di sawah. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketidakpuasan petani terhadap program pemerintah untuk meningkatkan produksi padi telah terjadi sejak lama. Bahkan, hasil Survei Persepsi Petani 2024 jauh lebih parah dibandingkan tahun 2018 kemarin, di mana hanya 17 persen yang menyatakan bahwa program pemerintah tidak mampu meningkatkan produktivitas mereka.

Maka tidak heran apabila sebanyak 58,5 persen responden mengaku produksi dan pendapatan mereka dari usaha pertanian tidak mengalami peningkatan sama sekali selama satu dekade terakhir. Rinciannya, 28,6 persen responden menyatakan tidak setuju, 5,9 persen sangat tidak setuju, dan 24 persen merasa tidak ada perubahan. Peningkatan hasil usaha di sektor pertanian masih merupakan angan-angan petani di seluruh Indonesia.

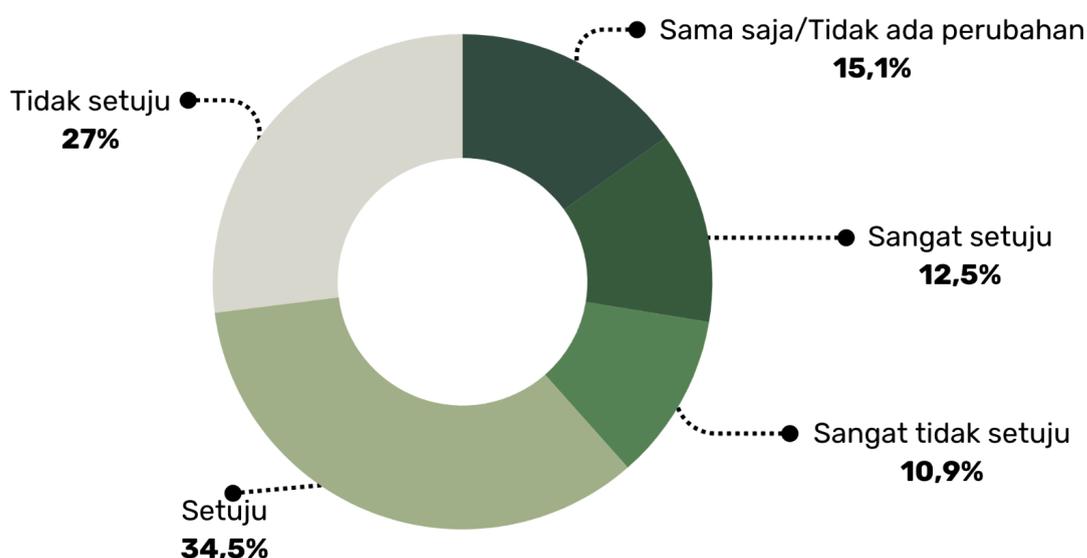
Saat ini produksi dan pendapatan dari usaha pertanian Anda meningkat atau lebih baik.



Petani di Indonesia juga diperhadapkan dengan tantangan besar pengendalian hama dan pemenuhan kebutuhan primer sektor pertanian. Total ada 37,8 persen responden mengatakan bahwa gangguan terhadap produksi pertanian mereka yang berupa hama, keterbatasan pupuk, dan akses air, belum terkendali. Bahkan 15,1 persen menyatakan bahwa tidak ada perubahan sama sekali semalam satu dekade terakhir.

Pemerintah seharusnya memainkan peran lebih penting dalam upaya menciptakan kondisi yang mendukung pertanian berkelanjutan, yaitu menanggulangi wabah hama dan mempermudah akses ke pupuk atau air. Apabila dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Petani 2018, memang ada peningkatan petani yang setuju bahwa pemerintah mampu mengendalikan gangguan produksi hingga 31 persen.

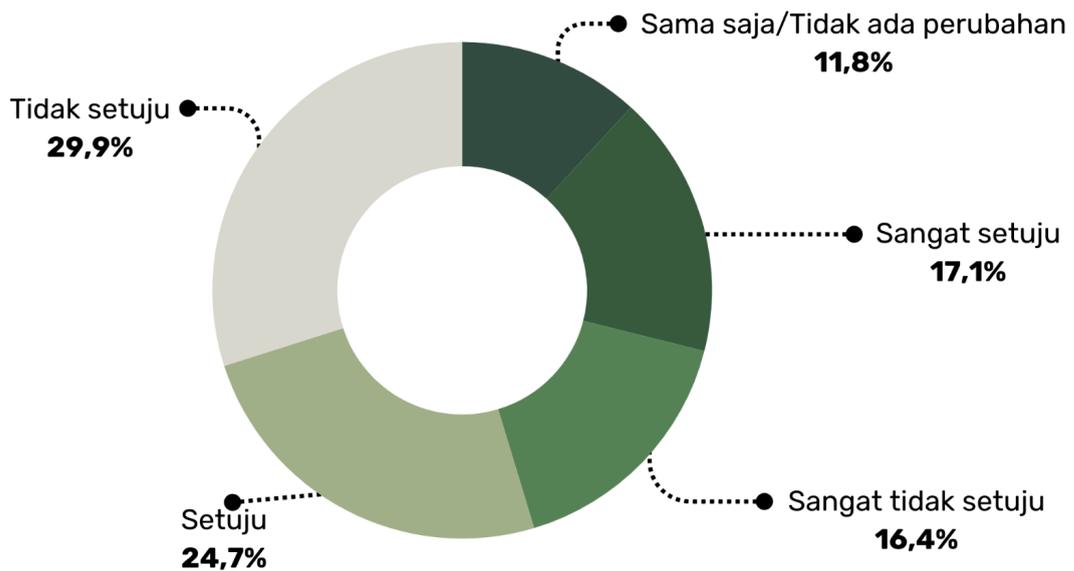
Gangguan produksi pada usaha pertanian Anda lebih sedikit/terkendali (hama, akses pupuk, ketersediaan air, dan lainnya).



Eksistensi petani di mata pemerintah menjadi persoalan lain yang cukup pelik. Pasalnya, total ada 46,4 persen responden mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan sama sekali oleh pemerintah tingkat daerah hingga pusat dalam pengambilan kebijakan atau perencanaan program-program. Bahkan, 11,8 persen petani mengaku kondisi tersebut tidak mengalami perubahan selama satu dekade terakhir.

Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Persepsi Petani 2018, di mana 45,6 persen petani menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam program-program pemerintah. Mereka hanya dijadikan sebagai kelompok sasaran/terdampak, sehingga sulit untuk bersuara memberikan masukan atau menyuarakan keadilan bagi petani.

Petani lebih banyak dilibatkan pemerintah (desa, kabupaten, dinas, BPP, dll).

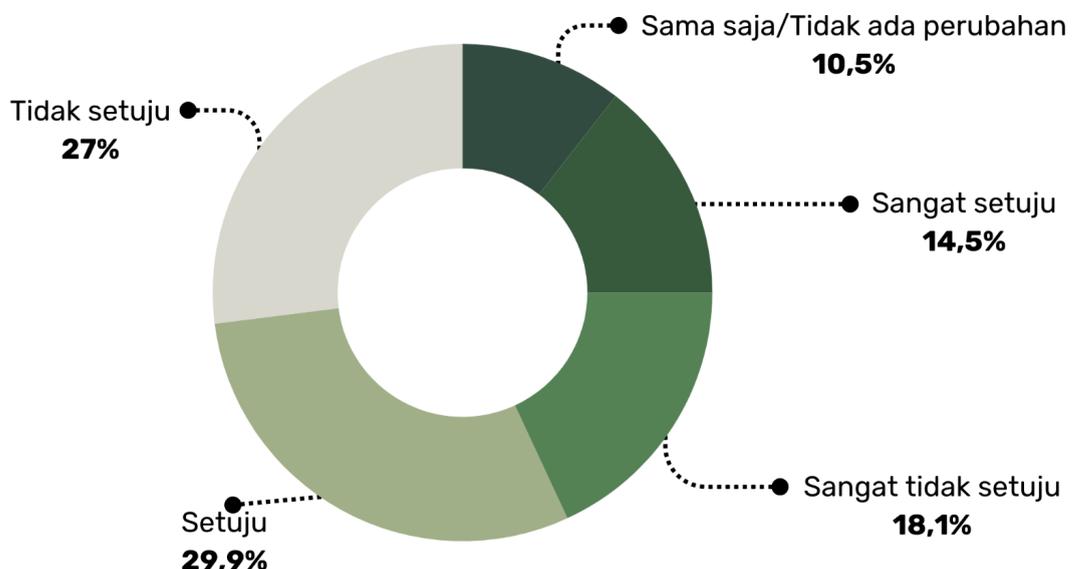


Keberhasilan model pertanian berkelanjutan sangat tergantung dengan kapasitas petani di seluruh Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah rendahnya penyuluhan yang diberikan kepada petani. Hasil Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan sebanyak 27 persen tidak setuju dan 18,1 persen sangat tidak setuju apabila saat ini petani telah mendapatkan banyak penyuluhan, baik oleh PPL, mahasiswa, atau babinsa tentang pertanian organik dan konvensional.

Petani dibiarkan tidak berdaya, sehingga selama sepuluh tahun terakhir tidak ada transformasi yang berarti bagi pertanian di Indonesia. Sebanyak 10,5 persen menyatakan bahwa tidak ada perubahan selama ini. Apabila dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Petani 2018, kondisi saat ini jauh lebih buruk.

Saat itu, hanya 21 persen petani yang menyatakan tidak mendapatkan penyuluhan dari pemerintah terkait pertanian organik dan konvensional, sementara 39 persen lainnya mengatakan bahwa selama mereka menjadi petani, pelaksanaan penyuluhan tidak ada perubahan sama sekali.

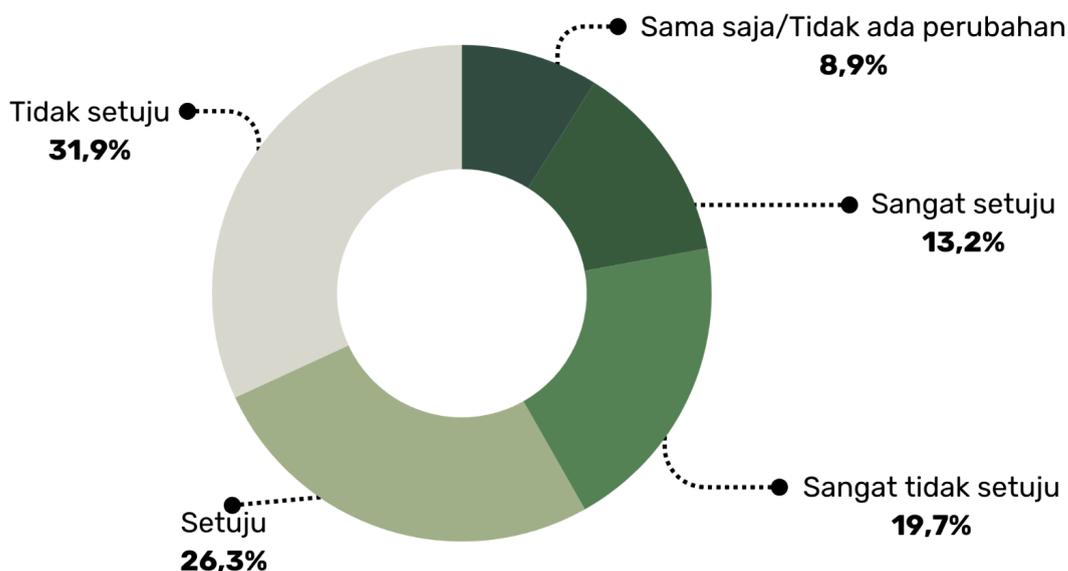
Saat ini Anda lebih banyak mendapatkan penyuluhan dari pemerintah (oleh PPL, mahasiswa, babinsa, baik tentang pertanian organik, maupun pertanian konvensional).



Survei Persepsi Petani 2024 juga mengungkap makin menurunnya bantuan pupuk organik pemerintah kepada petani di Indonesia. Total lebih dari separuh responden (51,6 persen) mengatakan bahwa mereka tidak mendapat pupuk organik. Sementara 8,9 persen lainnya merasakan tidak ada perubahan sama sekali terkait distribusi pupuk organik selama sepuluh tahun terakhir. Petani hanya diberikan opsi pupuk sintetis atau kimia yang berdampak buruk terhadap keberlanjutan kualitas lahan.

Kondisi tahun 2024 jauh lebih buruk dibandingkan tahun 2018 lalu, di mana Survei Persepsi Petani saat itu menunjukkan 36 persen petani yang tidak mendapatkan pupuk organik. Saat ini, persentase petani yang kesulitan akses pupuk organik malah meningkat hingga 15,6 persen.

Saat ini pemerintah lebih banyak memberikan bantuan pupuk organik kepada Anda.

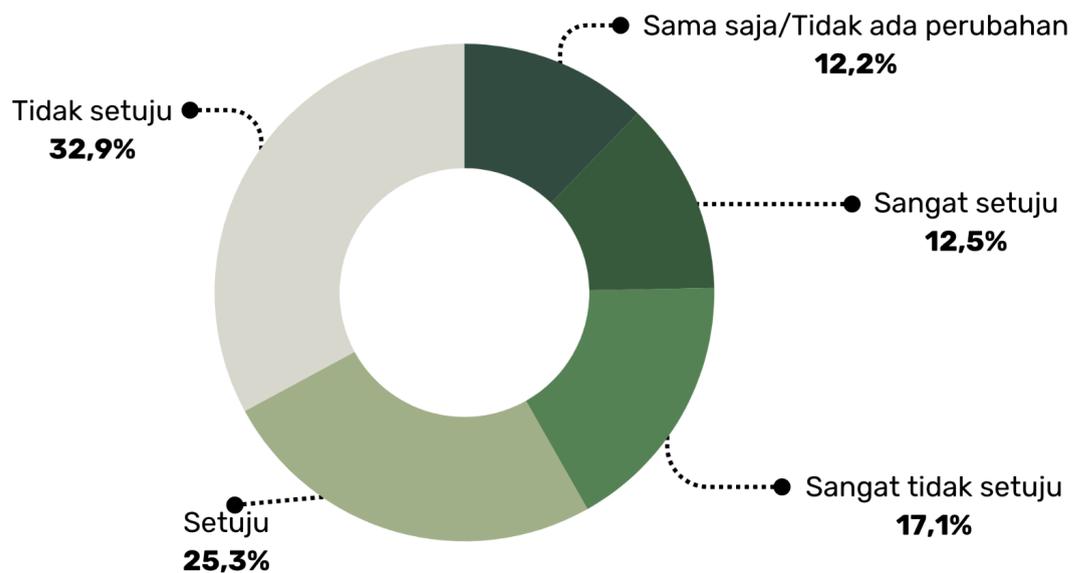


Senada dengan pupuk organik, bantuan benih dengan kualitas baik juga sangat terbatas. Tercatat setidaknya 50 persen petani mengaku pemerintah tidak banyak memberikan bantuan benih unggul untuk ditanam, sementara 12,2 persen tidak mengalami perubahan sama sekali dalam sepuluh terakhir. Padahal, benih unggul berkontribusi besar terhadap keberhasilan hasil pertanian yang mereka lakukan.

Cuaca ekstrem dan musim yang semakin tidak menentu akan sangat berisiko terhadap pertanian di Indonesia. Apabila benih yang ditanam rentan terhadap perubahan cuaca, maka potensi gagal panen meningkat secara drastis. Implikasinya besar bagi kehidupan petani, mulai dari kesehatan fisik hingga kondisi ekonomi keluarga mereka.

Minimnya akses terhadap benih unggul oleh petani dirasakan sejak lama, bahkan sejak sepuluh tahun yang lalu. Hasil Survei Persepsi Petani tahun 2018 menyebutkan 38,4 persen petani yang tidak mendapatkan bantuan benih unggul. Artinya, selama ini tidak ada perbaikan sama sekali oleh pemerintah.

Pemerintah lebih banyak memberikan bantuan benih dengan kualitas yang baik kepada Anda.



Sebanyak 76 persen petani di Indonesia menggunakan benih hasil sendiri untuk menanam kembali di musim tanam berikutnya. Mereka tidak mendapat bantuan benih unggul dari pemerintah. Karenanya, tak heran apabila makin banyak ditemukan petani yang mengalami penurunan produksi atau bahkan gagal panen.



Perdagangan yang Adil

Oleh: Hana Syakira, Roza Yusfiandayani

Pilar keempat dalam kedaulatan pangan adalah perdagangan yang adil. Sistem ini merupakan bentuk perdagangan yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen, pelaku industri, pedagang, hingga konsumen. Perdagangan yang adil dibangun atas dasar dialog, transparansi, dan saling menghargai, dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih luas melalui kerja sama dan kesepakatan yang saling menguntungkan (Propantoko et al., 2019). Selanjutnya, bagaimana persepsi petani terkait implementasi prinsip-prinsip Perdagangan yang Adil di lapangan?

Terdapat empat pernyataan kunci yang diukur untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perdagangan gabah saat ini mendukung kesejahteraan petani. Keempat indikator ini mencakup pandangan petani terhadap harga gabah, kebijakan pembelian pemerintah, peningkatan pendapatan dari program-program pemerintah, serta partisipasi petani dalam perumusan kebijakan terkait.

Kebijakan pemerintah terkait harga gabah dan beras diterapkan karena adanya *market failure* dan *nonmarket failure* yang menyebabkan pasar gabah dan beras tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Fluktuasi harga dan ancaman inflasi menjadi pendorong utama bagi kebijakan ini (Nugrahapsari & Hutagaol, 2021). Meskipun kebijakan ini bertujuan melindungi kepentingan produsen dan konsumen, hasil Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dirasakan secara positif oleh petani.

Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan bahwa hanya 12,5 persen petani sangat setuju bahwa harga gabah saat ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan 10 tahun lalu, sementara 43,4 persen setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, angka yang tidak bisa diabaikan adalah 21,7 persen responden yang tidak setuju, dan 8,9 persen sangat tidak setuju.

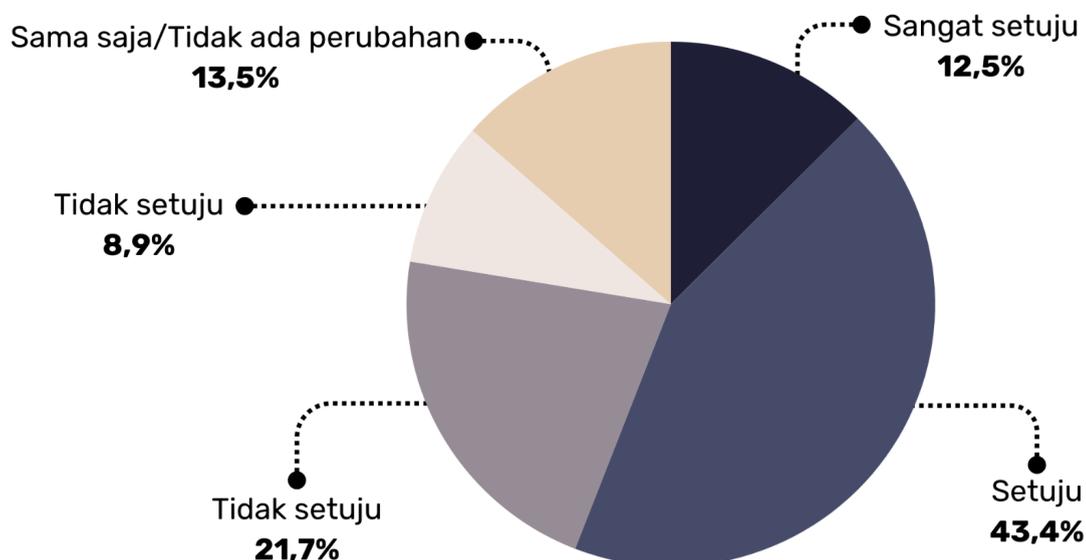
Apabila dibandingkan dengan Survei Persepsi Petani 2018, petani yang setuju bahwa harga gabah lebih baik dan menguntungkan meningkat dari 17 persen pada tahun 2018 menjadi 55,9 persen pada tahun 2024. Namun, masih terdapat 30,6 persen petani yang tidak setuju bahwa harga tersebut menguntungkan, meskipun persentase ini menurun dari 43 persen di tahun 2018. Walaupun terlihat peningkatan positif pada persepsi petani tahun 2024, ketidakpuasan masih terbilang signifikan, di mana sepertiga petani di Indonesia merasa bahwa harga gabah masih sangat kurang.

Data dari Badan Pusat Statistik (2024) mendukung adanya peningkatan harga gabah selama dekade



terakhir, di mana harga gabah kering panen (GKP) meningkat dari Rp 4.904,51 per kilogram pada Agustus 2015 menjadi Rp 6.421,86 per kilogram pada Agustus 2024, atau naik sebesar 30,98 persen. Namun, meskipun ada peningkatan harga nominal, hasil survei mengindikasikan bahwa keuntungan ini tidak dirasakan secara merata oleh seluruh petani. Banyak dari mereka menghadapi kendala tambahan, seperti inflasi dan kenaikan biaya produksi pertanian yang meliputi harga pupuk dan alat-alat pertanian.

Harga gabah yang diterima petani lebih baik dan menguntungkan dari 10 tahun lalu.



Berdasarkan hasil Survei Persepsi Petani 2024, sebanyak 45,4 persen responden merasa tidak puas dengan harga pembelian gabah oleh pemerintah, yang terdiri dari 29,6 persen yang menjawab tidak setuju dan 15,8 persen sangat tidak setuju. Hanya 13,8 persen yang sangat setuju bahwa harga pemerintah menguntungkan bagi petani, sementara 28,3 persen setuju. Sisanya, sebanyak 12,5 persen merasa bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan sebelumnya.

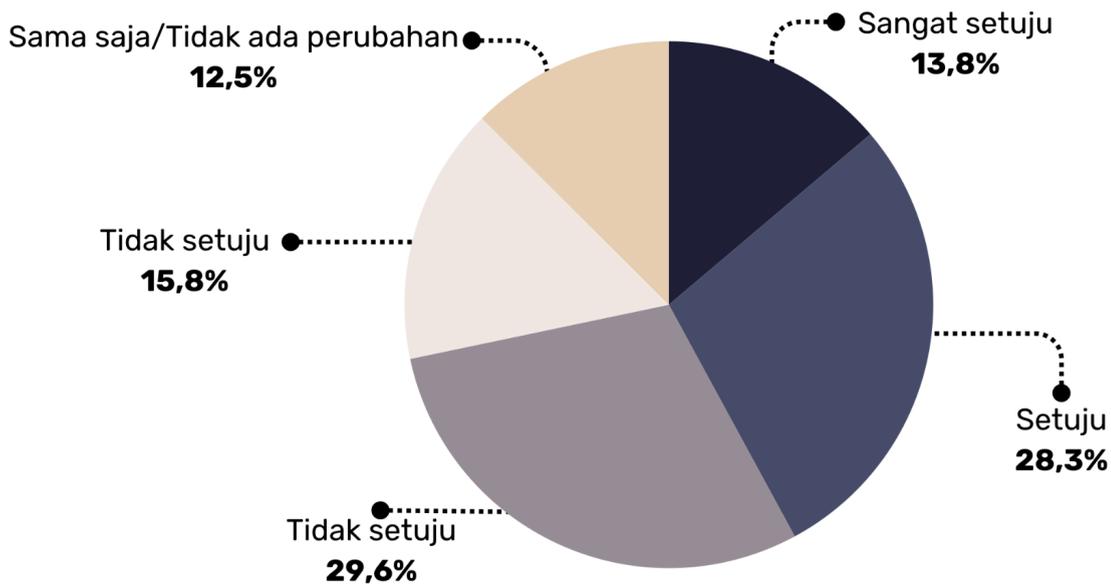
Hal tersebut menggambarkan rendahnya komitmen pemerintah untuk memberikan harga gabah yang lebih layak bagi petani. Selama sepuluh tahun terakhir, petani selalu diperhadapkan dengan masalah harga rendah, sehingga keuntungan yang didapat tidak setimpal dengan jerih payah mereka saat di sawah.

Jika dibandingkan dengan survei tahun 2018, terdapat perbedaan sangat signifikan. Pada tahun 2018, sebanyak 52 persen petani merasakan harga pembelian pemerintah tidak memberikan keuntungannya bagi petani. Pada tahun 2024, nilai itu turun drastis menjadi 12,5 persen. Namun, ketidakpuasan meningkat dengan tajam dari 22 persen di tahun 2018 menjadi 45,4 persen di tahun 2024.

Meskipun Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) mengalami peningkatan dari Rp 3.700 per kilogram pada Agustus 2015 menjadi Rp 6.000 per kilogram pada Agustus 2024, petani di Indonesia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mereka masih terilit hutang dan keterbatasan dana di kala musim tanam.

Perbedaan signifikan antara kepuasan responden terkait harga gabah dan harga pembelian pemerintah dalam survei ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam merespons aspirasi petani. Pemerintah harus melihat bahwa penyesuaian HPP dengan kebutuhan dan beban ekonomi yang dihadapi petani di era sekarang sangat krusial, terlebih dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Pemerintah membeli gabah dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani.

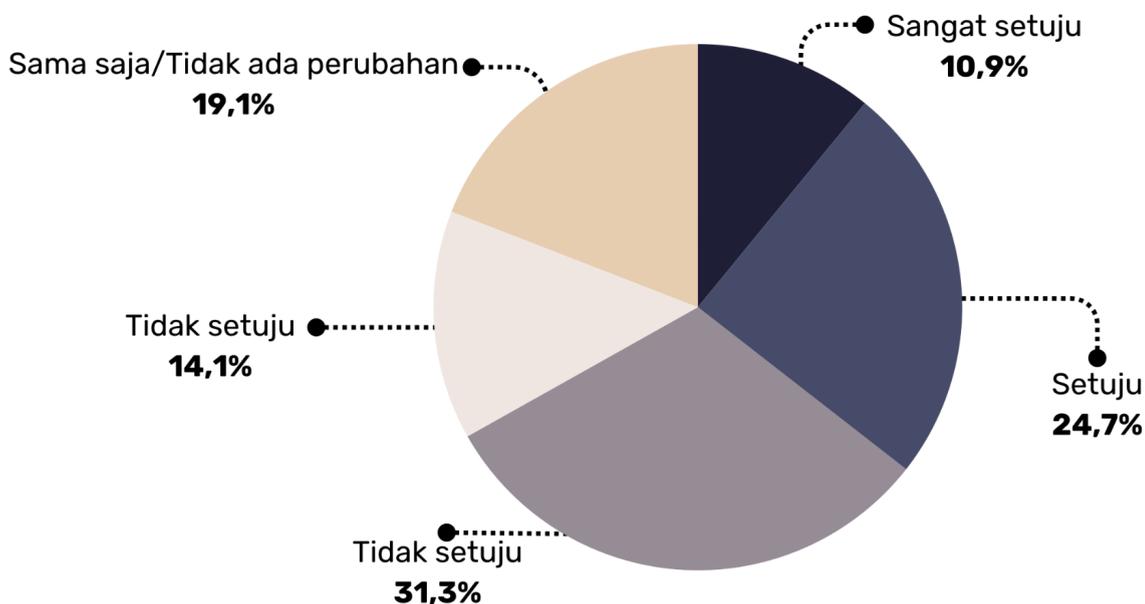


Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani memang memiliki potensi besar untuk mendorong kesejahteraan mereka. Beberapa program yang umumnya diterapkan untuk membantu petani adalah subsidi pertanian, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi petani, diversifikasi pangan, pengembangan infrastruktur, dan penguatan pasar digital bagi produk-produk pertanian.

Harga gabah yang diterima petani selalu lebih rendah, sehingga tidak mendapatkan banyak keuntungan. Survei Persepsi Petani 2024 mengungkap bahwa sebanyak 45,4 persen petani merasa program-program pemerintah di sektor pertanian tidak mampu meningkatkan pendapatan mereka sama sekali. Bahkan, ada 19,1 persen petani mengaku bahwa tidak ada perubahan sama sekali selama sepuluh tahun terakhir.

Kondisi saat ini jauh lebih parah dibandingkan tahun 2018, di mana 33,8 persen petani yang mengaku bahwa program pemerintah tidak signifikan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Hasil survei tahun ini melejit hingga 11,6 persen. Apabila dibandingkan dengan populasi petani tahun 2023, maka sedikitnya 12,7 juta petani tidak mengalami perbaikan selama sepuluh tahun terakhir.

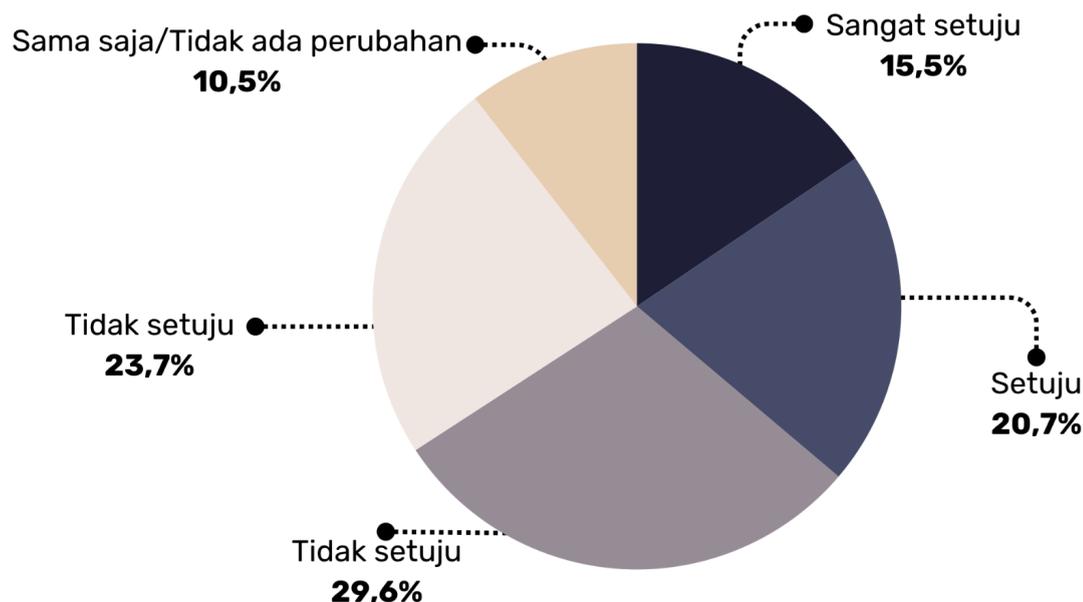
Pendapatan petani meningkat dan lebih baik dengan adanya berbagai program pemerintah.



Pelibatan petani dalam perumusan harga pembelian oleh pemerintah merupakan langkah yang sangat penting dan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dan adil bagi mereka. Sayangnya, Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan hanya 36,2 persen petani yang merasa diikutsertakan dalam perumusan harga pembelian gabah/beras.

Sementara itu, lebih dari separuh petani (53,3 persen) mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan harga. Sisanya, 10,5 persen petani benar-benar diabaikan selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini menjadi kritik keras bagi pemerintah agar mau duduk bersama petani saat membahas kebijakan harga.

Petani dilibatkan dalam perumusan kebijakan harga pembelian pemerintah.



Petani adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan lahannya. Setiap hari mereka berjerih payah ke sawah untuk memastikan tanamannya tumbuh dengan baik. Sayangnya, semua hal tersebut tidak setara dengan harga dan keuntungan yang mereka dapatkan. Akhirnya, harapan petani untuk hidup sejahtera berujung hanya angan-angan.

Apabila pemerintah ingin merumuskan kebijakan harga lebih transparan dan berkeadilan, ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan. Pertama, melibatkan koperasi petani atau perwakilan petani secara langsung. Kedua, melakukan konsultasi terbuka dan rapat secara partisipatif. Ketiga, riset dan kajian di lapangan. Terakhir, penilaian dan evaluasi secara berkala.



Pangan Berkelanjutan

Oleh: Hanan Anisa Saniya

Konsumsi pangan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam sistem pangan yang resilien. Pangan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai pola dan sistem pangan yang disandarkan pada sumber daya pangan lokal, yaitu segala sumber pangan yang didapatkan dan diolah dari lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat.

Sistem pangan berkelanjutan merupakan pilar utama kedaulatan pangan. Penguatan pilar ini dapat dicapai apabila masyarakat menggunakan bahan pangan lokal, ketersediaan dan kemudahan akses bahan pangan, keanekaragaman bahan pangan, dan memiliki penyimpanan bahan cadangan pangan (Propantoko, et.al, 2019).

Konsumsi pangan yang dihasilkan dari produksi lokal tidak hanya menguntungkan secara lingkungan, namun menggerakkan ekonomi petani dan desa. Konsumsi pangan lokal juga menjadi prasyarat penting jika ingin berdaulat pangan. Dalam perspektif kedaulatan pangan, konsumsi pangan lokal memberikan peluang terhindar dari ketergantungan pangan dari impor.

Hasil Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar petani memperoleh dan mengonsumsi pangan yang berasal dari menanam sendiri atau lokal. Sebanyak 50,7 persen setuju dan 34,5 persen sangat



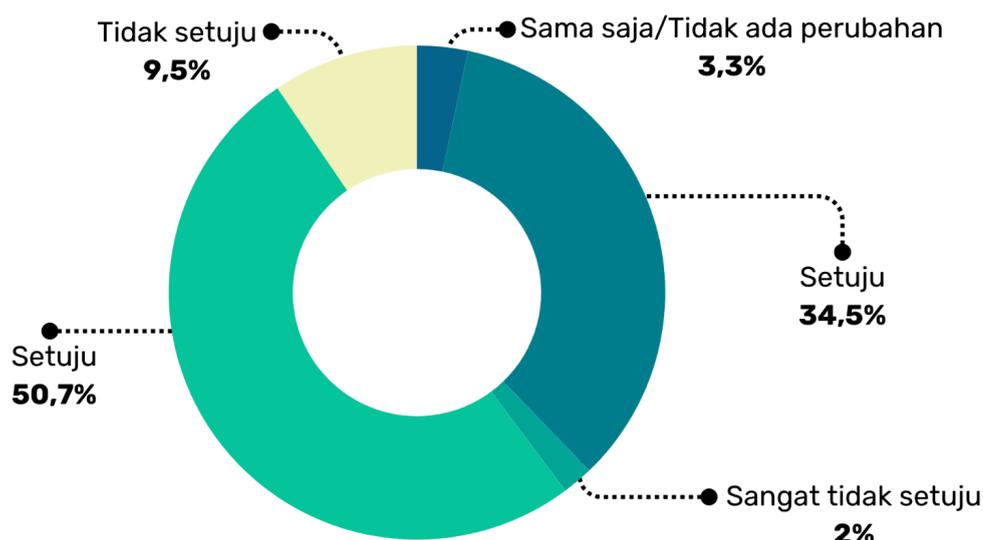
setuju bahwa saat ini mereka mendapatkan makanan yang dihasilkan sendiri atau dari sekitarnya. Kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan pangan harian mereka adalah gambaran kemandirian, sekaligus perjuangan hidup.

Banyak dari petani di Indonesia yang masuk dalam kategori keluarga miskin. Karenanya, ada keterbatasan akses terhadap pangan yang lebih beragam. Petani memilih untuk hidup lebih sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Apabila dilihat dari keberagaman pangan nasional, sumber karbohidrat tidak hanya beras. Ada sumber pangan lain terbesar di banyak wilayah, seperti jagung, ubi, sorgum, dan sagu. Bagi sebagian kelompok petani, konsumsi pangan selain beras menjadi salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hasil survei tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018. Saat itu, sekitar 60 persen petani mengaku lebih banyak mengonsumsi pangan yang dihasilkan sendiri. Apabila dilihat dari sudut pangan keamanan pangan, maka peningkatan pangan lokal adalah upaya untuk bertahan hidup. Secara ekologi, konsumsi pangan lokal adalah langkah nyata untuk menekan emisi karbon dari sistem pertanian konvensional.

Saat ini keluarga Anda lebih banyak mengonsumsi pangan yang dihasilkan sendiri atau dihasilkan petani sekitar (bukan pabrikan) atau pangan lokal.

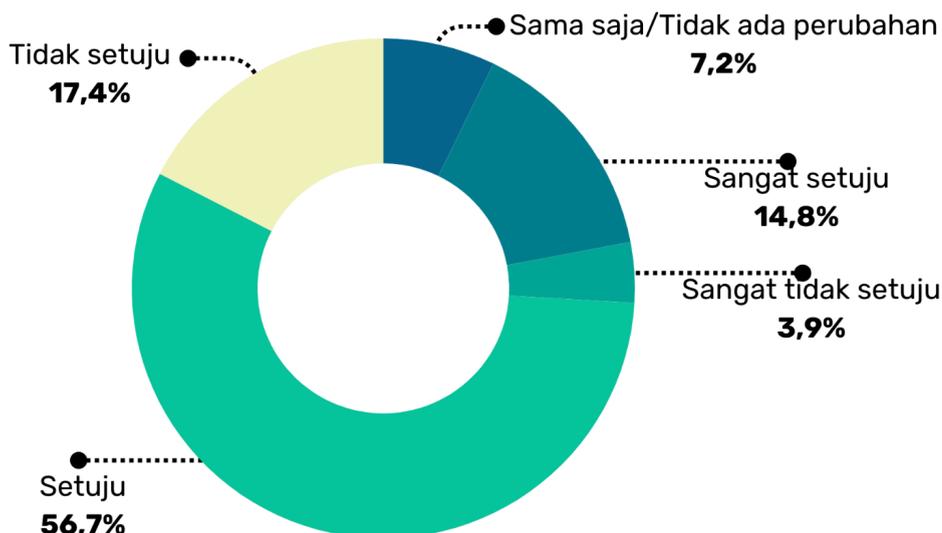


Konsumsi pangan lokal dipengaruhi tidak hanya faktor produksi, namun juga akses pangan. Akses pangan lokal menyangkut dua hal, yaitu ketersediaan dan daya beli. Ketersediaan pangan lokal bisa berasal dari budidaya yang dilakukan petani itu sendiri maupun oleh pihak lain. Daya beli petani terkait dengan tingkat pendapatan dan harga.

Hasil Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan bahwa mayoritas petani setidaknya 7 dari 10 responden mengaku memiliki kemudahan dalam mengakses pangan lokal di lingkungan sekitar atau pasar. Adapun petani yang menyatakan tidak mengalami perbaikan akses sebanyak 21,4 persen dan yang menyatakan sama saja sebesar 7,2 persen.

Pangan lokal masih diproduksi dan dipasarkan dengan harga yang terjangkau oleh petani. Dengan demikian, mereka memiliki akses yang memadai. Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018, terjadi kenaikan persentase petani yang menyatakan membaiknya akses pangan lokal hingga 31,4 persen.

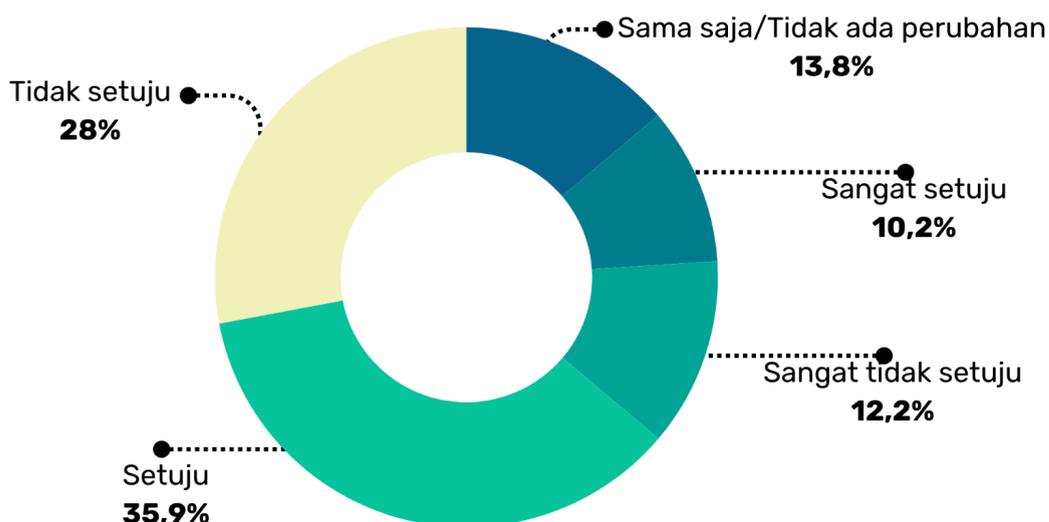
Saat ini Anda lebih mudah mendapatkan (ketersediaan dan harga yang terjangkau) pangan lokal di lingkungan sekitar atau pasar.



Peran pemerintah dalam meningkatkan hasil produksi pangan non beras dirasakan sebagian petani di Indonesia. Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan bahwa 46,1 persen petani mengatakan bahwa pemerintah saat ini lebih banyak memberikan bantuan/program untuk produksi tanaman selain padi, jagung, dan kedelai.

Namun, petani yang mengatakan sebaliknya juga cukup besar, yaitu 40,1 persen. Artinya, ada dualisme peran pemerintah di lapangan. Keseriusan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan lokal non beras, jagung, dan kedelai harus diperkuat. Sisanya, ada 13,8 persen petani yang merasakan bahwa selama satu dekade terakhir tidak ada perubahan signifikan dari peran pemerintah untuk penguatan pangan lokal.

Pemerintah saat ini lebih banyak memberikan bantuan/program untuk produksi tanaman pangan selain padi, jagung, atau kedelai.

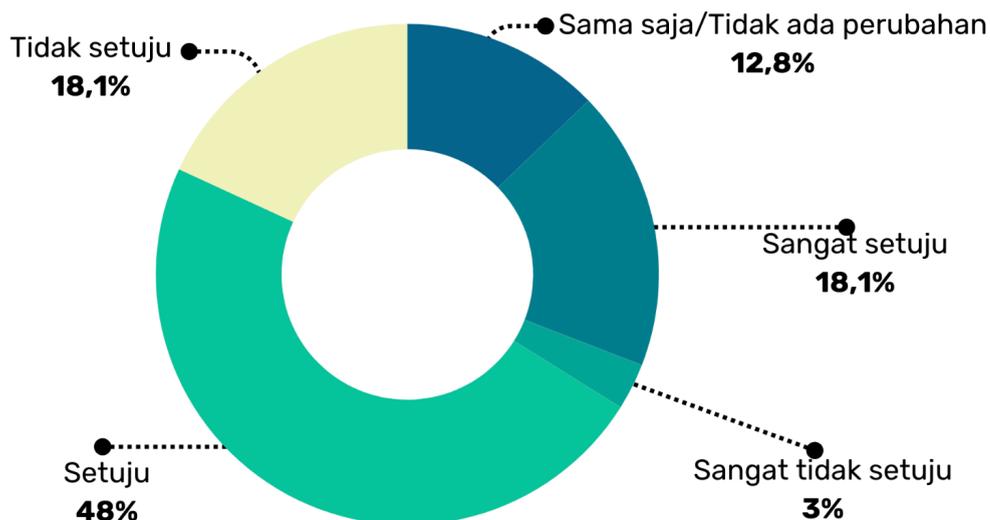


Cadangan pangan merupakan pangan yang disimpan oleh keluarga untuk menjamin konsumsi yang cukup pada periode waktu tertentu. Umumnya petani menyimpan pangan, terutama pangan pokok, dalam satu siklus produksi (satu musim) atau untuk satu tahun. Mencadangkan sejumlah pangan merupakan upaya petani memastikan ketahanan pangan keluarga.

Upaya memastikan ketersediaan pangan terus oleh masyarakat daerah, apalagi saat ini ancaman gagal panen dan penurunan produksi karena anomali iklim makin kuat. Ketidakpastian yang makin menguat direspons oleh petani dengan memperbesar cadangan pangan keluarga. Hasil panen yang mereka peroleh tidak seluruhnya dijual, namun disimpan sebagai cadangan pangan sampai musim panen berikutnya.

Kemandirian pangan melalui cadangan pangan tercermin dari hasil Survei Persepsi Petani 2024. Sebanyak 66,1 persen petani mengatakan bahwa selama sepuluh tahun terakhir mereka lebih banyak menyimpan cadangan pangan di tingkat keluarga. Sementara 12,8 persen menyatakan tidak ada perubahan, artinya mereka telah melakukan penyimpanan pangan sejak lama.

Sepuluh tahun terakhir Anda lebih banyak memiliki cadangan pangan di tingkat keluarga.





yang memadai, seperti pupuk, air, benih unggul, dan mesin pertanian.

Dua permasalahan pokok yang muncul adalah harga dan pupuk. Kedua hal tersebut adalah permasalahan laten petani di seluruh Indonesia, bahkan telah terjadi lebih dari tiga dekade. Petani selalu mengeluhkan harga gabah yang sangat murah sehingga mendapatkan keuntungan kecil, demikian pula pupuk yang selalu langka pada musim-musim tertentu.

Sepuluh Kata Kunci Harapan Petani Indonesia

Kata Kunci	Frekuensi
Petani	289
Pertanian	136
Pemerintah	127
Harga	99
Pupuk	81
Bantuan	54
Panen	35
Pangan	34
Lahan	28
Sejahtera	26

Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Mirisnya, saat ini mereka menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan adanya dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Curah hujan yang tidak menentu, peningkatan suhu, serta bencana alam yang lebih sering terjadi telah mempengaruhi produktivitas pertanian dan memperburuk kondisi ekonomi para petani. Dalam menghadapi kondisi ini, para petani sangat berharap pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada mereka, khususnya dalam hal penguatan kapasitas dan kesejahteraan mereka.

Pertama, salah satu harapan utama petani adalah pendidikan dan pelatihan tentang pertanian yang berkelanjutan, serta teknologi adaptasi iklim. Petani

mebutuhkan bimbingan dalam implementasi praktik-praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan, seperti teknik konservasi air, penanaman varietas unggul, serta penggunaan pupuk yang ramah lingkungan. Dengan bekal pengetahuan dan teknologi yang tepat, petani akan lebih siap dalam menghadapi tantangan iklim yang terus berubah.

Sebagai bagian dari perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, sangat penting bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif petani dalam proses pengambilan keputusan. Suara dan aspirasi mereka perlu didengar dan dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Tak kalah penting, para petani juga menantikan penguatan perlindungan harga komoditas di tingkat pasar. Ketidakstabilan harga produk pertanian seringkali menjadi salah satu penyebab utama turunnya kesejahteraan petani. Petani berharap pemerintah bisa memperkuat sistem distribusi yang lebih adil dan memberikan akses pasar yang lebih luas untuk menjual produk mereka, termasuk melalui pengembangan pasar digital yang dapat menghubungkan petani langsung dengan konsumen atau industri pengolahan.

Dengan demikian, kebijakan yang proaktif dan berpihak pada petani diharapkan meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Harapan-harapan yang disampaikan petani melalui Survei Persepsi Petani 2024 menunjukkan bahwa petani Indonesia berupaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya dan terus terlibat aktif dalam penguatan ketahanan pangan nasional.

Kesimpulan & Rekomendasi

Kesimpulan

Reforma agraria menjadi program prioritas kelima dan kedaulatan pangan menjadi program prioritas ketujuh Nawacita dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Dua prioritas ini kemudian dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam Visi Indonesia Maju dan RPJMN 2020–2024. Namun setelah satu dekade berkuasa, konflik agraria semakin membara, guremisasi lahan petani semakin parah, dan kedaulatan pangan semakin sulit terwujud dengan meningkatnya impor pangan.

Survei yang dilakukan pada September 2024 kepada 304 petani menunjukkan hal tersebut. Pun jika survei persepsi petani tersebut dibandingkan dengan survei yang dilakukan tahun 2018 silam, secara umum hasil survei ini tidak jauh berubah. Hasil survei menunjukkan perubahan iklim sudah terjadi dan dirasakan dampaknya oleh 98,6 persen petani. Musim yang makin tidak menentu, kekeringan, penurunan curah hujan, suhu meningkat, dan kelelahan akibat cuaca merupakan dampak perubahan iklim yang paling dirasakan petani. Sementara dampak ikutan dari perubahan iklim juga turut dirasakan petani. Persentase dampak ikutan yang dirasakan petani dari yang paling besar ke kecil berupa penurunan hasil panen, ledakan hama penyakit tanaman, penurunan kualitas panen, pengeluaran keluarga meningkat, gagal panen, biaya produksi, terutama pupuk, meningkat, dan harga jual yang menurun.

Besarnya dampak yang dirasakan petani, sayangnya belum dimbangi peran yang optimal dari pemerintah. Pemerintah dinilai belum berperan dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim belum oleh 51,3 persen petani. Situasi ini menyebabkan kekhawatiran yang besar pada 91,4

persen petani atas nasibnya di masa depan.

Sekalipun dukungan pemerintah dan para pihak lain dinilai kurang, nyatanya petani terus melakukan upaya adaptasi secara mandiri. Beberapa upaya adaptasi yang dilakukan adalah mengubah pola dan waktu tanam, menanam varietas unggul, pengairan mandiri (pompa air), memperkuat jejaring dengan petani, dan mengubah durasi serta waktu kerja. Sementara adaptasi penerapan pertanian ramah iklim merupakan aksi yang paling sedikit dilakukan.

Dengan melihat hasil demikian di atas dapat dikatakan petani sedang mengalami situasi yang berat. Impitan iklim menekan petani dari sisi sosial, ekonomi dan juga Kesehatan. Padahal petani masih terbatas kapasitas adaptasinya. Sayangnya upaya dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program untuk membawa petani keluar dari persoalan masih jauh dari cukup.

Hasil survei tahun 2024 juga menunjukkan pencapaian cita-cita daulat pangan masih jauh dari seharusnya. Menggunakan pendekatan dan kerangka kerja kedaulatan pangan yang ada, baik *la via campesina* dan KRKP, situasi yang nampak pada hasil survei mengindikasikan hal tersebut. Konsep kedaulatan pangan sebagai jawaban atas kegagalan konsep ketahanan pangan meletakkan petani dan hak nya sebagai komponen utama. Dalam konteks pembangunan pangan pertanian pemenuhan hak petani menjadi prasyarat penting dan utama. Dengan demikian kedaulatan pangan mensyaratkan petani sebagai subyek yang harus dipenuhi hak-haknya. Hak petani sekurangnya terkait hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, hak untuk hidup layak, hak untuk menentukan apa yang dilakukan, dibudidayakan, hak memiliki pengetahuan, hak untuk mendapatkan sumber daya dan hal lainnya yang memungkinkan kualitas hidup petani menjadi lebih baik. Dengan

demikian kedaulatan sejatinya tidak hanya soal impor tidak impor. Kedaulatan pangan juga tidak hanya bicara soal pertumbuhan produksi. Kedaulatan pangan melampaui itu semua karena kedaulatan pangan soal hidup petani.

Hasil survei menggambarkan situasi masih jauhnya pencapaian kedaulatan pangan, yaitu akses terhadap sumber produksi, model pertanian berkelanjutan, perdagangan yang berkeadilan bagi petani, dan sistem pangan lokal. Dengan menggunakan cara pandang ini maka hasil survei dapat kita katakan bahwa pilar akses terhadap sumber produksi masih jauh dari cukup. Sebanyak 65,5 persen petani menyatakan bahwa akses terhadap lahan tidak bertambah atau naik. Akses terhadap pupuk juga demikian, ada 35,9 persen petani yang masih kesulitan mendapatkan pupuk. Demikian halnya dengan akses terhadap permodalan, hasil survei menunjukkan 57,9 persen petani tidak mengalami perubahan akses terkait permodalan dengan skema khusus untuk petani baik dari bank pemerintah maupun lembaga keuangan lain. Hanya akses terhadap pengairan yang dinilai petani lebih baik atau meningkat selama kurun sepuluh tahun terakhir. Sebanyak 52 persen petani menyatakan akses terhadap pupuk lebih baik dalam kurun sepuluh tahun terakhir.

Pada pilar model pertanian berkelanjutan mayoritas petani (69 persen) mengatakan bahwa kesuburan lahan pertanian semakin menurun sebagai akibat dari model pertanian yang dikembangkan dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Situasi yang sama juga terjadi terkait dengan produksi padi yang dinilai petani tidak berhubungan dengan program pemerintah. Dengan kata lain program pemerintah tidak meningkatkan produksi dinyatakan lebih dari 66 persen petani. Dalam hal penggunaan benih milik sendiri juga petani merasa bahwa program pemerintah belum mendorong terjadinya pemuliaan dan meningkatnya penggunaan benih milik petani. Jika pun pemerintah membantu petani menyediakan benih, kualitasnya jauh dari dikatakan

baik. Akibatnya sebanyak 62 persen petani menyatakan bantuan benih pemerintah belum baik kualitasnya. Produksi dan pendapatan yang didapatkan petani juga dinilai belum meningkat dengan adanya berbagai program dan kebijakan pemerintah. Terkait pelibatan petani dalam perumusan kebijakan juga dinilai masih jauh dari ideal. Petani masih ditempatkan sebagai objek daripada subjek yang terlibat dalam penyusunan kebijakan. Sebanyak 68 persen petani menyatakan hal ini.

Pada pilar perdagangan yang adil bagi petani, mayoritas petani menyatakan dalam kurun sepuluh tahun harga gabah terus naik. Namun sayangnya kenaikan ini bukan karena dorongan kebijakan harga yang dilakukan pemerintah melalui mekanisme HPP, tetapi karena mekanisme pasar murni. HPP dinilai Sebagian besar (57,9 persen) persen petani tidak menguntungkan dan mempengaruhi harga yang mereka terima. Terkait pendapatan, sebanyak 64,7 persen petani menyatakan bahwa program dan kebijakan pemerintah tidak mendorong perbaikan pendapatan mereka. Hal ini juga dipengaruhi karena petani tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan harga. Sebanyak 63,8 persen petani menyatakan hal ini.

Pada pilar sistem pangan lokal, sebanyak 50,7 persen petani menyatakan bahwa di tengah impitan iklim dan kebijakan mereka lebih banyak mengonsumsi pangan hasil sendiri. Hal ini dikarenakan pendapatan petani yang terbatas. Hal ini didukung pula oleh kemudahan petani mengakses pangan lokal yang ada di sekitar mereka. Sebanyak 56,6 persen petani menyatakan hal tersebut pada survei ini. Terkait upaya pemerintah menganeekaragamkan produksi selain padi dan kedelai, sebanyak 54 persen petani menyatakan tidak dilakukan pemerintah. Artinya produksi pangan masih terkonsentrasi pada pangan pokok saja, tidak pada pangan lokal yang lebih luas. Dengan situasi iklim yang makin tidak menentu maka sebagian besar petani (66 persen)

menyatakan saat ini banyak menyimpan pangan sebagai cadangan pangan keluarga.

Rekomendasi

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa beberapa harapan utama petani Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan pro petani.** Pemerintah harus memberikan lebih banyak dukungan dalam bentuk kebijakan yang pro-petani, termasuk subsidi dan bantuan langsung yang dapat meringankan beban mereka.
2. **Harga yang menguntungkan petani.** Penting bagi petani agar harga hasil pertanian stabil dan menguntungkan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan sistem yang memastikan harga jual produk mereka tetap layak dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar.
3. **Penguatan akses terhadap sumber produksi.** Akses terhadap sumber produksi seperti lahan, pengairan, benih, dan permodalan perlu diperkuat dengan kebijakan dan program yang baik dan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen mereka.
4. **Perbaiki kualitas lahan.** Perkuat program yang fokus pada perbaikan kualitas lahan pertanian, termasuk teknik pengelolaan tanah yang baik agar hasil panen lebih optimal.
5. **Inovasi teknologi pertanian.** Perkuat kapasitas dan daya adaptasi petani melalui pelatihan dan akses terhadap teknologi pertanian modern yang dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian.
6. **Pertanian berkelanjutan.** Model pertanian harus diarahkan pada pengembangan praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan, sehingga pertanian dapat terus berproduksi dalam jangka panjang.
7. **Fokus pada kesejahteraan petani.** Kebijakan dan program harus bermuara pada tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya, serta menciptakan ketahanan pangan yang kuat untuk masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arini, S. C. (2024, 3 Oktober). *Daftar infrastruktur yang dibangun Jokowi selama 10 tahun berkuasa*. detik. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7571113/daftar-infrastruktur-yang-dibangun-jokowi-selama-10-tahun-berkuasa>
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian. (2017). *Rencana strategis 2015-2019*. [https://bppsdp.pertanian.go.id/storage/app/media/file %20berita/Renstra %20BPPSDMP %202015 %20-%202019%20Revisi%20Ke%202_2.pdf](https://bppsdp.pertanian.go.id/storage/app/media/file%20berita/Renstra%20BPPSDMP%202015%20-%202019%20Revisi%20Ke%202_2.pdf)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023, 4 Desember). *Diseminasi hasil sensus pertanian 2023 tahap I*. <https://www.bps.go.id/id/news/2023/12/04/535/diseminasi-hasil-sensus-pertanian-2023-tahap-i.html> (diakses pada 24 September 2024)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023, 4 Desember). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/04/2050/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023, 28 Desember). *Rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjE5NyMx/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama--2023.html> (diakses pada 24 September 2024)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (20 Maret 2024). *Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA0MyMx/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2017-2023.html>. (Diakses pada 2 Oktober 2024)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024, 2 September). *Rata-rata harga gabah bulanan menurut kualitas, komponen mutu dan HPP di tingkat petani*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzNCMy/rata-rata-harga-gabah-bulanan-menurut-kualitas--komponen-mutu-dan-hpp-di-tingkat-petani.html> (diakses pada 24 September 2024)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 tahap 1*. <https://sensus.bps.go.id/st2023/> (diakses pada 24 September 2024)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024, 1 Maret). *Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi, 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html> (diakses pada 7 Oktober 2024)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2024, 1 Agustus). *Waspada! Pertanian Jadi Sektor Paling Terdampak Perubahan Iklim*. <https://www.bmkg.go.id/berita/?p=bmkg-waspada-pertanian-jadi-sektor-paling-terdampak-perubahan-iklim&lang=ID&tag=press-release> (diakses pada 7 Oktober 2024)
- Breakthrough Agenda. (2024). *Agriculture breakthrough: Priority international actions for 2024*. <https://bit.ly/ba-agr-2024>
- CNBC. (2023, 24 Mei). *Subsidi Pupuk dari Masa ke Masa, SBY vs Jokowi Besar Mana?*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230524084922-128-440017/subsidi-pupuk-dari-masa-ke-masa-sby-vs-jokowi-besar-mana>. (diakses pada 2 Oktober 2024)
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2023). *World food and agriculture – Statistical yearbook 2023*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc8166en>
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2024). *Government expenditures in agriculture (2001-2022). Global and regional trends*.

[https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/government-expenditures-in-agriculture-\(2001-2022\)/en](https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/government-expenditures-in-agriculture-(2001-2022)/en)

- FAO Indonesia. (2022). *Food Security and Agricultural Development in Indonesia*. Jakarta: FAO.
- Ghofar, A., Kurniawan, A., Hastutik, A. D., Kusuma, A., Dwinanto, ., Jambore, F. T., Roziqin, F., Widodo, F., Jatmiko, H., Harahap, M., Ridwanuddin, P., Ndamung, P., Manggala, S., Ahmadi, T. S., & Artha, U. (2023). *Tinjauan lingkungan hidup 2023: Terdepan di luar lintasan*. Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi.
- Hadi, P. U., Susilowati, S. H., Rachman, B., Helena, J. P., & Purwantini, T. B. (2009). Perumusan model subsidi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan dan pendapatan petani. *Laporan Akhir. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian Bogor*.
- International Food Policy Research Institute (IFPRI). (2024). *Global food policy report: Food systems for healthy diets and nutrition*. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
<https://hdl.handle.net/10568/141760>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2021. *Laporan Kajian Food Loss dan Waste di Indonesia*. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/06/Report-Kajian-FLW-FINAL-4.pdf> (diakses pada 1 Oktober 2024)
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2023). *Laporan kinerja Kementerian Pertanian*.
<https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/LAKIN%20Kementan%202023.pdf> (diakses 24 September 2024)
- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). 2018. Laporan Audit Sosial Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Maros, Luwu Utara, Lombok Utara, Flores Timur, dan Sumba Timur.
<https://kedaulatanpangan.org/hasil-riset/laporan-audit-sosial-kebijakan-pupuk-bersubsidi-di-maros-luwu-utara-lombok-utara-flores-timur-dan-sumba-timur/>
- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. (2018). *Survei Persepsi Petani*. Bogor: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023. Dekade krisis agraria: Warisan nawacita dan masa depan reforma agraria pasca perubahan politik 2024*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria
- Lee, H., Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P., ... & Park, Y. (2023). IPCC, 2023: *Climate Change 2023: Synthesis Report, Summary for Policymakers. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.
- Nugraha, I. A. (2022). *Ketidakstabilan Harga Pangan di Indonesia: Penyebab dan Solusi*. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Pembangunan*, 30(2), 134-150.
- Nugrahapsari, R. A., & Hutagaol, M. P. (2021). Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Harga Gabah dan Beras di Indonesia. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 39(1), 11. <https://doi.org/10.21082/fae.v39n1.2021.11-26>
- Propantoko, H., Hasian, W., Naurani, N., Batara, L.N., Abdullah, S. (2019). *Indeks kedaulatan pangan*. Bogor: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2023). *Analisis kesejahteraan petani 2023*.
https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Buku_analisis_Kestan_2023.pdf. (diakses 24 September 2024)
- Rachman, B., & Sudaryanto, T. (2010). Impacts and future perspectives of fertilizer policy in Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(3), 193-205.
- Saragih, B. (2020). *Kebijakan Pertanian di Era Jokowi: Analisis Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Simarmata, T dan B. Joy, 2010. *Pemanfaatan Kompos Jerami Dalam Teknologi Pemulihan Kesehatan Dan Kesuburan Lahan Sawah Dan Peningkatan Produksi Padi Secara Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Pada Program Pemulihan Kesehatan & Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan di Indonesia (Prov. Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumsel dan Sumbar, September – November 2010)*. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, Jakarta.
- Wiradi, G. (2005). *Reforma agraria untuk pemula*. Sekretariat Bina Desa.
- World Bank. (2023). *Agricultural Policies in Indonesia: Productivity and Growth Challenges*. Washington DC: World Bank.
- United Nations Environment Programme. (2024). *Food Waste Index Report 2024. Think Eat Save: Tracking Progress to Halve Global Food Waste*. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/45230>. [Accessed: Oct. 8, 2024].
- Widyastuti, R., & Suryana, A. (2021). Efektivitas Program Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Agraria*, 29(1), 85-98.
- Yustika, A. E. (2021). *Reforma Agraria: Tantangan dan Realisasi di Era Jokowi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja subsidi pupuk di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 4(2), 271-271. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm>